KOLABORASI *STAKEHOLDER* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TAHURA SULAWESI TENGAH

STAKEHOLDER COLLABORATION IN CONFLICT RESOLUTION IN FOREST PARK CENTRAL SULAWESI

MARIA SOFIANA

TESIS

PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2019

KOLABORASI *STAKEHOLDER* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TAHURA SULAWESI TENGAH

STAKEHOLDER COLLABORATION IN RESOLVING CONFLICTS IN FOREST PARK SULAWESI TENGAH

Oleh

MARIA SOFIANA
E 202 17 006

TESIS
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Pertanian Program Studi Pertanian

PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2019

PENGESAHAN

KOLABORASI *STAKEHOLDER* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TAHURA SULAWESI TENGAH

Oleh
Maria Sofiana
Nomor Stambuk : E20217006

TESIS

Untuk Memenuhi Salah satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Pertanian
Program Studi Magister Ilmu Pertanian,

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini,

Palu, 11 November 2019

(Dr. Golar, S.Hut., M.Si.)	**(Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut, M.Sc.)**
Ketua Tim Pembimbing	**Anggota Tim Pembimbing**

Mengetahui,

(Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary, M.Si., ASEAN Eng)	**(Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si.)**
Direktur Pascasarjana	**Koordinator Program Studi**
Universitas Tadulako	**Magister Ilmu Pertanian**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, (Tesis) ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palu, November 2019

nbuat pernyataan,

MARIA SOFIANA
E 202 17 006

ABSTRAK

Maria Sofiana – E 202 17 006 Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penyelesaian Konflik Di Tahura Sulawesi Tengah di bimbing oleh Dr. Golar, S.Hut., M.Si dan Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc

Banyak pihak memiliki kepentingan berbeda terhadap sumberdaya hutan di Tahura Sulteng. Ada yang sejalan maupun bertentangan dengan tujuan konservasi. Dalam rangka pelestarian Tahura Sulteng perlu tindakan bersama menyusun kebijakan, mengharmonisasi antara kepentingan masyarakat dan pengelola Tahura Sulteng. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura, menganalisis masalah dan merumuskan pola kolaborasi penyelesaian konflik. Penelitian dilaksanakan bulan Januari-Maret 2019. Penelitian menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada responden secara (*purposive sampling*), meliputi pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Tahura, masyarakat Desa Ngatabaru, pemerintah Desa Ngatabaru, petugas lapangan dan pihak UPTD Tahura. Analisis data menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan *Reed et al*, (2009), mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam *key player*, *context setter*, *subject* dan *crowd*. Model analisis *stakeholder* dengan tiga tahapan identifikasi *stakeholder*, klasifikasi *stakeholder*, dan menggambarkan hubungan antar *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukan 12 *stakeholder* mempunyai tingkat pengaruh dan kepentingan berbeda dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura. Terdapat 4 stakeholder dalam (*key player)* 2 stakeholder (*Subject)*, 4 stakeholder (*Context Setter),* dan 2 stakeholder (*Crowd).* Tingkat hubungan antar *stakeholders* mempunyai peluang menjalin kerja sama. Namun secara aktual hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan Tahura Sulteng cenderung lemah. Hasil analisis data menunjukan terdapat masalah kurangnya singkronisasi dan koordinasi. Dengan ini perlu merealisasikan pola kolaborasi yang memiliki kepentingan tinggi di kawasan Tahura Sulteng. Membangun visi bersama menyatukan perbedaan sudut pandang pihak yang bersepakat, saling menghargai, memberikan manfaat agar tercapainya pengelolaan Tahura Sulteng yang lestari dan berkelanjutan.

Kunci: Kolaborasi *stakeholder*, penyelesaian konflik, Tahura Sulteng.

ABSTRACT

Maria Sofiana - E 202 17 006 Stakeholder Collaboration in Conflict Resolution at Central Sulawesi Forest Park. Superviserd by Golar and Sudirman Dg. Massiri

Many parties have an interest in forest resources in Central Sulawesi. There is interests that are in line with conservation goals while there are also those that are not in line with conservation. In the context of preservation of Central Sulawesi Tahura need joint action arrange a policy, harmonize the interests of the community and the management of Tahura. To identify the role of stakeholders in the management and utilization of SDH in Tahura. then analyze the problem and formulate conflict resolution collaboration patterns. This research was conducted from January to March 2019. This research applying data collection techniques through interviews with respondents. Respondents were determined (purposive sampling), includes parties who have an interest in Tahura management inclu des the people of Ngatabaru Village, Public figure, Ngatabaru Village government, field officers, and and UPTD Tahura. Data analysis using matrix of influence and interest Reed et al, (2009), by classifying stakeholders into key player, context setter, subject and crowd. The stakeholder analysis model with three stages includes, stakeholder identification, stakeholder classification and describe the relationships between stakeholders. The research result showing 12 stakeholders have different levels of influence and interest in management and utilization in Tahura. There are 4 stakeholder groups included in the (key player), 2 (Subject) stakeholders (Subject), 4 (Context Setter) stakeholders, and 2 Crowd stakeholder. The level of relationships between stakeholders has the opportunity to establish cooperation. However the actual cooperation relations between stakeholders of Central Sulawesi Tahura the management tends to be weak. The results of data analysis in the field show that there is a problem of lack of synchronization and coordination between stakeholders who have an interest. With this, it is necessary to realize a pattern of stakeholder collaboration that has high importance around the Central Sulawesi area. construct a shared vision of bringing together the different points of view of the parties to the agreement respecting each other, and provide benefits for the achievement of sustainable and sustainable management of Central Sulawesi.

Keywords: Stakeholder collaboration, Conflict resolution, Central Sulawesi forest Park

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "**Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penyelesaian Konflik Di Tahura Sulawesi Tengah**" Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pertanian (MP) di Pascasarjana Universitas Tadulako.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Yang terhormat kepada Bapak **Dr. Golar, S.Hut** selaku pembimbing utama dan Bapak **Dr. Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc** selaku pembimbing anggota.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Mahfudz, MP selaku Rektor Universitas Tadulako, bapak Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary., M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako, bapak Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si selaku koordinator Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Tadulako, Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu-Ilmu Pertanian yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.

Untuk yang selalu memberi semangat Fadli, S.Hut, dan Kakak Abdul Rahman, S.Hut., M.Sc, Kakak Arman Maiwa, S.Hut M.P, dan Bapak Dr. Hendra Pribadi, S.P., M.P. Sahabat-Sahabatku Rhamdhani Fitrah B, S.Hut., MP. Desy Ana Mikaningrum, S.Pd, Wahyu Andranata, S. Hut, Haris Priyana, S.Hut, Nanik Junita Utami, S.Ak, Endang Nur Rahma, S.Pd, Rizal Reamur, S.Pd, Muhammad Fasli, S.Pd terima kasih atas kebersamaan, support, motivasi, bantuan serta dukungannya selama ini.

Sahabat Seperjuangan Ujang Kurniawan, S.Pt,. Ruiya M Nurung, S.Hut. Ilda Sutopo, SP. Dramayanti, SP. Tuti Handayani Arifin, S.Pd. Nining Riskya A Gusu, S. Pt. Marwa, S.Pt. Kaharuddin, S.Pt. Annadira, S.Hut. Maria Sofiana, S.Hut. Nasrum,

S. Hut. Moh Yant Pratama, S. Hut. Aznur, SP. Saiful, SP. Abd Rauf, S.Hut, Reinaldi, S.Hut. Rima Hasiani Melati, S.Hut. Dienul Aslam, S.Hut. Zakiah Usman, SP.

Saudara tercinta Septian Sapril, Moh. Assagif, Yayan Setiawan, Kurniawan Hamlan, Ending, Tiwa. Wahyu kodi, terima kasih atas motivasi, bantuan dan dukungannya.

Akhirnya dengan rasa syukur yang tulus dan penuh haru penulis persembahkan tesis ini kepada Ayahanda **Sapril, S.Pd** dan Ibunda **Aspiyah** dengan penuh rasa kasih yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan kepercayaan serta doa restunya yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan banyak terima kasih, serta dengan rasa syukur juga yang mendalam, penulis ingin berterima kasih kepada setiap orang yang telah datang dalam hidup penulis, yang mengilhami, menyentuh, dan menerangi penulis melalui kehadirannya.

Penulis menyadari tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan guna kesempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kehutanan.

Palu, November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER LUAR	
HALAMAN COVER DALAM	**i**
HALAMAN PENGESAHAN	**ii**
PERNYATAAN	**iii**
ABSTRAK	**iv**
ABSTRACT	**v**
UCAPAN TERIMA KASIH	**vi**
DAFTAR ISI	**viii**
DAFTAR TABEL	**xi**
DAFTAR GAMBAR	**xii**
DAFTAR LAMPIRAN	**xiii**
BAB 1. PENDAHULUAN	**1**
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan / Manfaat Penelitian	4
BAB 2. PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN	**5**
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2. Kerangka Teori	10
2.2.1 Konsep Kolaborasi	10
2.2.2 Kolaborasi dalam Pengelolaan Hutan	10
2.2.3 Kawasan Konservasi	14
2.2.4 Masyarakat di Kawasan Konservasi	17
2.3 Kerangka Pemikiran	19
BAB 3. METODE PENELITIAN	**23**
3.1. Jenis Penelitian	23
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3. Alat dan Bahan	23
3.4. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	24
3.5. Jenis dan Sumber Data	24
3.5.1 Data Primer	24
3.5.2 Data Sekunder	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data	25
3.7. Teknik Analisis Data	25
3.7.1 Analisis *Stakeholder*	25
3.7.2 Identifikasi *Stakeholder*	26
3.7.3 Klasifikasi *Stakeholder*	26

3.8 Masalah dalam Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Tahura 32
3.9 Konsep operasional dan pengukuran 33
BAB 4. KONDISI WILAYAH PENELITIAN **35**
1.1. **Keadaan Biofisik** 35
4.1.1 Letak dan Luas 35
4.1.2 Iklim dan Hidrologi 36
4.1.3 Keadaan Tanah 36
4.1.4 Keadaan Flora 37
4.1.5 Keadaan Fauna 38
1.2. **Kondisi Sosial Ekonomi** 38
4.2.1 Kependudukan 38
4.2.2 Keadaan Ekonomi 38
4.2.3 Agama dan istiadat 39
4.2.4 Pendidikan 39
4.2.5 Aksesibilitasi 40
1.3. **Kondisi Biofisik Lokasi Desa Ngatabaru** 40
4.3.1 Letak Geografis 40
4.3.2 Topografi dan Geologi 40
4.3.3 Kondisi Lingkungan 41
4.3.4 Penggunaan Lahan 41
1.4. **Kondisi Sosial Ekonomi dan Keyakinan Masyarakat** 42
4.4.1 Kependudukan 42
4.4.2 Mata Pencaharian 42
4.4.3 Tingkat Kependidikan 44
4.4.4 Agama 44
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN **44**
5.1. Konflik Tahura Sulteng 44
5.2. *Stakehoder* yang terlibat dalam pengeloaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulteng 46
5.2.1 Entitas Kelompok Pemerintah 48
5.2.2 Entitas Kelompok Masyarakat 51
5.2.3 Entitas Kelompok Perguruan Tinggi 52
5.2.4 Entitas Kelompok (LSM) 53
5.3. Klasifikasi *Stakeholder* dalam Konflik Di Tahura Sulteng 54
5.4. Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Tahura Sulteng 57
5.4.1 Key player 58
5.4.2 Subject 60
5.4.3 Context setter 60
5.4.4 Crowd 61
5.5. Tingkat Hubungan Antar Pemangku 62

Kepentingan atau *Stakeholder*
5.6. Masalah-masalah dalam pelaksanaan strategi kolaborasi dalam Tahura Sulteng 65
5.7 Pola Kolaborasi Penyelesaian Konflik Tahura Sulteng 67
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN **71**
6.1 Kesimpulan 71
6.2 Saran 72
DAFTAR RUJUKAN **74**
LAMPIRAN **81**

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Persamaan dan perbedaan Penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian terdahulu	9
2.	Ukuran kualitatif terhadap pengaruh dan kepentingan *Stakholder*	27
3.	Jenis dan jumlah Ternak di Desa Ngatabaru	42
4.	Mata pencaharian Penduduk di Desa Ngatabaru	42
5.	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Ngatabaru	43
6.	Peran *Stakeholder* yang terlibat dalam pengeloaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulteng	48
7.	Hasil perhitungan nilai tingkat pengaruh *stakeholder*	55
8.	Hasil perhitungan nilai tingkat kepentingan *stakeholder*	56
9.	Pola hubungan Stakeholder	63

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Kerangka kemikiran penelitian	22
2.	Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed *et al.* 2009)	31
3.	Hasil analisis matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder*	58

DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
1.	Peta Tutupan Lahan Lokasi Penelitian Tahura Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	82
2.	Peta Pemanfaatan Blok Tahura Provinsi Sulawsesi Tengah	83
3.	Pedoman Wawancara	84
4.	Dokumentasi Penelitian	92
5.	Riwayat Hidup	96

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang harus dijaga kelestariannya karena memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Hutan tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tapi juga bermanfaat secara ekologi. Berdasarkan fungsi pokoknya hutan ditetapkan sebagai hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi (Undang-undang nomor 41, 1999). Tahura merupakan salah satu kawasan lindung yang berada di antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Hutan ini merupakan satu-satunya kawasan konservasi yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan kawasan ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/Kpts-II/1999 tanggal 29 Januari 1999, dengan luas 7.128,00 Ha. Sejak awal penetapan hingga pengelolaannya dilakukan sepihak tanpa melibatkan para pihak, termasuk masyarakat dan institusi adat di dalam/sekitar kawasan (Lahandu, dkk, 2016).

Potensi yang dimiliki Tahura Sulteng mengundang berbagai pihak untuk ikut memanfaatkan potensi yang ada, kepentingan berbagai pihak cukup beragam, ada yang sejalan dan ada pula yang bertentangan dengan tujuan konservasi. Semenjak penetapan kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya (Tahura) Sulawesi Tengah (Sulteng) telah banyak menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaannya. adanya aktivitas masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan. Keberadaan desa dan kelurahan di sekitar dan dalam kawasan

hutan masih memiliki ketergantungan hidup yang tinggi dengan kawasan hutan. Hal ini diketahui masih adanya aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan, baik pemafaatan hasil hutan maupun lahan, khususnya masyarakat Dusun Tompu yang berada di Desa Ngatabaru Kabupaten Sigi. Menurut (Lahandu, dkk, 2016), Masyarakat setempat telah mengklaim keberadaan mereka lebih dahulu ada sebelum penetapan kawasan hutan Tahura Sulteng.

Pemanfaatan kawasan Tahura Sulteng telah berlangsung cukup lama di Desa Ngatabaru, sehingga berdampak terhadap kerusakan hutan, turunnya kualitas dan kuantitas air yang terjadi pada Embung Ngia di Desa Ngatabaru. Kondisi ini yang mengakibatkan pengelolaan hutan Tahura Sulteng menjadi tidak optimal dan lestari. Oleh karena itu dalam rangka pelestarian Tahura Sulteng perlu menjadi hasil tindakan bersama dengan menyusun sebuah arah kebijakan dalam mengharmonisasi antara kepentingan masyarakat, dan pengelola Tahura Sulteng untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada di kawasan Tahura.

Menurut Golar, (2014), Kesepakatan kolektif yang dibangun seringkali akan berbenturan dengan regulasi yang berlaku. Hal ini harus segera direspon oleh penentu kebijakan, sebagai upaya perbaikan tata kepemerintahan dan pengelolaan hutan kedepan. *Stakeholder* yang mempunyai masing-masing kepentingan sangat mempengaruhi dalam pengelolaan Tahura Sulteng, baik dalam bentuk suatu kebijakan, kesamaan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) maupun aturan kelembagaan lainnya. Upaya kerjasama antar *stakeholder* dalam penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan Tahura di Desa Ngatabaru sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan (Ramadhan, dkk, 2015). Sebaiknya kepentingan dilakukan secara partisipatif, agar intervensi keputusan pengelolaan Tahura Sulteng dapat diimpelmentasikan dengan model kolaborasi stakeholder. Keberhasilan kolaborasi stakeholder terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan Tahura tergantung pada kesepakatan bermitra dalam menangani permasalahan ada di Tahura Sulteng.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran para pihak (*stakeholder)* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura Sulteng
2. Apa permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan di Tahura Sulteng
3. Bagaimana pola kolaborasi dalam penyelesaian konflik di Tahura Sulteng

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi peran *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura Sulteng
2. Menganalisis masalah-masalah dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan di Tahura Sulteng
3. Merumuskan pola kolaborasi dalam penyelesaian konflik di Tahura Sulteng

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kejelasan peran para pihak dalam pengelolaan Tahura dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap rencana pengelolaan Tahura Sulteng.
2. Dengan mengetahui kendala pelaksanaan kolaborasi dapat membantu dalam menentukan kebijakan penyusunan program kolaborasi yang lebih efektif dan efisien guna mewujudkan pengelolaan Tahura Sulteng secara berkelanjutan.
3. Secara akademisi, diharapkan dapat menambah informasi ilmiah tentang pola kolaborasi pengelolaan Tahura untuk memberikan perubahan ke arah lebih baik dan menumbuhkan inspirasi baru dalam penelitian lanjutan terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan Tahura Sulteng.

BAB II
KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar pihak (*stakeholders*) berkepentingan membuat penanganan masalah ditingkat wilayah tidak efektif terhadap pelestarian alam seperti Tahura Sulteng sehingga adanya perkembangan pendekatan kolaborasi atau kemitraan sebagai fokus utama dalam penelitian untuk menyelesaikan problem atau sengketa antara para pihak dalam konflik multi pihak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muis, *et al.,* (2013), dalam penelitiannya desain model kolaborasi sebagai resolusi konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (Kasus di Desa Watumeata Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso) mengidentifikasikan terdapat tujuh *stakeholder* dalam kegiatan kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan TNLL, khususnya di Desa Watumaeta. Ketujuh *stakeholder* tersebut adalah masyarakat lokal (masyarakat Watumaeta), pemerintah desa, pemerintah kecamatan, instansi terkait (BBTNLL), keamanan, pemerintah daerah/kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) teridentifikasi permasalahan dan harapan atau keinginan kedua belah pihak (masyarakat dan pihak BBTNLL) terkait resolusi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Watumaeta.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan TNLL khususnya di Desa Watumaeta telah diupayakan proses kolaborasi dengan

melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki keterkaitan langsung dengan TNLL. *Stakeholder* yang dimaksud yaitu perwakilan masyarakat Watumaeta, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, instansi terkait/pihak BBTNLL, keamanan dan lembaga swadaya masyarakat. Peran *stakeholder* dalam kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan memiliki kekuatan dalam hubungan antar *stakeholder* yang dinilai baik oleh setiap *stakeholder*. Namun peran *stakeholder* masih kurang dalam hak (rights), tanggung jawab (responsibilities) dan manfaat/keuntungan (revenues) yang masih harus ditingkatkan dari peran yang telah dijalankan. Konsep kolaborasi yang dapat dikembangkan adalah revitalisasi aturan dan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan serta konsep optimalisasi pengembangan usaha tani masyarakat Watumaeta.

Winara dan Mukhtar, (2011), dengan judul penelitian Potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Papua, dengan tujuan untuk mengetahui potensi penerapan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih di Papua. Menunjukkan bahwa pemangku kepentingan terhadap Taman Nasional (TN) Teluk Cenderawasih adalah (1) kelompok pemerintah, baik pusat maupun daerah, (2) Lembaga Swadaya Masyarakat, (3) pihak swasta dan (4) masyarakat lokal. Pemangku kepentingan utama terhadap pengelolaan Taman Nasional adalah Balai TN Teluk Cenderawasih, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat adat. Para pemangku kepentingan memiliki kesamaan kepentingan terhadap Taman Nasional yaitu untuk tujuan konservasi, mengambil manfaat dan

aktivitas lain yang mendukung pengelolaan. Terdapat peran positif para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan Taman Nasional namun belum membentuk sinergi, sehingga sistem kolaborasi potensial untuk diterapkan dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih.

Maiwa, (2015), dengan judul penelitian Manajemen Kolaborasi Sebagai Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu dengan tujuan mengidentifikasi konflik dan peran *stakeholder* dalam upaya resolusi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan Dongi-Dongi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, menunjukan bahwa konflik Dongi-Dongi berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat Dongi-Dongi, hal ini dikarenakan kebutuhan hidup masyarakat Dongi-Dongi bergantung pada hasil bertani pada kawasan TNLL, disisi lain, otoritas BBTNLL tidak mengizinkan masyarakat masuk apalagi mendiami kawasan TNLL.

Iskandar, (2015), dengan judul analisis peran *stakeholders* di cagar alam Gunung Tinombala provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan mengetahui aktivitas masyarakat di CA Gunung Tinombala kaitannya dalam pemanfaatan lahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dan merumuskan partisipasi para pihak dalam pengelolaan CA Gunung Tinombala. Menunjukan Aktivitas masyarakat di CA Gunung Tinombala adalah pemanfaatan lahan hutan yang digunakan untuk menanam tanaman kakao dan cengkeh, dan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu pertukangan, kayu bakar dan rotan serta rumusan partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan CA Gunung Tinombala berdasarkan kriteria fungsi pengelolaan yaitu:

1) Tahap perencanaan: adanya kejelasan wewenang setiap *stakeholders* dalam membangun partisipasi dan perencanaan yang optimal dan bersifat lintas sektoral, dalam menyusun program kerja dan pendanaan,

2) Tahap pengorganisasian: adanya mekanisme dan prosedur dalam membagun partisipasi *stakeholders*, serta bentuk organisasi dan tata hubungan kerjasama yang jelas bagi setiap level *stakeholders*,

3) Tahap pelaksanaan: adanya sinkronisasi program dan komunikasi yang efektif pada masing-masing *stakeholders*, sehinga terjalin frekuensi hubungan dan koordinasi, guna pembagian peran pada masing-masing level pelaksanaan program dan

4) Monitoring dan evaluasi: monitoring dan evaluasi antar *stakeholders* bersifat multi-sektor serta adanya pengawasan yang bersifat partisipatif.

Maksud penelitian ini adalah pelestarian kawasan Tahura di Sulawesi Tengah perlu dilakukan upaya resolusi konflik lahan maupun pemanfaatan sumberdaya hutan dengan memadukan antara pelestarian dengan kepentingan masyarakat lokal dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial berbagai masyarakat yang hidup dekat perbatasan kawasan Tahura melalui pengembangan model pengelolaan kolaborasi adaptif sumberdaya hutan.

Taruk La'bi, (2014), dengan judul penelitian kajian pengelolaan Taman Wisata Alam Wera Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan menganalisis permasalahan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Wera. menunjukan bahwa permasalahan yang dianalisis dalam pegelolaan TWA Wera menjadi kelemahan dari segi internal seperti SDM masih rendah serta belum

memadainya sarana prasarana pendukung dan kondisi pengelolaan Taman Wisata Alam Wera dan sekitarnya masih kurang terekspose maupun kegiatan pengelolaan Taman Wisata Alam Wera selama ini belum dilakukan sebagaimana mestinya dimana belum adanya penataan batas Taman Wisata Alam Wera serta belum dibaginya kawasan hutan tersebut kedalam blok.

Adapun kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneltian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dengan penelitian dilaksanakan	Perbedaan dengan penelitian dilaksanakan
Aji Winara Abdullah Syarif Muhktar	Potensi Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Papua	Mengetahui potensi penerapan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih di Papua.	Mengetahui pola kolaborasi terbaik dalam pengelolaan Tahura Sulteng
Muis, *et. Al.*	Desain Model Kolaborasi Sebagai Resolusi Konflik Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.	Menganilisis peran stakeholder dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan	Mengidentifikasi peran *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan
Maiwa, A	Manajemen Kolaboraasi Sebagai Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu	Menganalisis peran *stakeholder*s terhadap pengelolaan di Dongi-Dongi TNLL	Mengidentifikasi peran *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura Sulteng
Iskandar	Analisis Peran *Stakeholders* Di Cagar Alam Gunung Tinombala Provinsi Sulawesi Tengah	Merumuskan partisipasi para pihak dalam pengelolaan CA Gunung Tinombala	Mengetahui pola kolaborasi terbaik dalam pengelolaan Tahura Sulteng
Taruk La'bi, Semuel	Kajian Pengelolaan Taman Wisata Alam Wera Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Menganalisis Permasalahan-Permasalahan Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Wera.	Menganalisis masalah-masalah dalam pelaksanaaan kolaborasi pengelolaan di Tahura Sulteng

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Kolaborasi

Ko-manajemen atau juga disebut pengelolaan kolaboratif *(collaborative management),* pengelolaan kooperatif *(cooperative management), round-table management, share management,* pengelolaan bersama *(joint management)* atau pengelolaan multi-pihak *(multi-stakeholder management)* telah diterapkan banyak negara di dunia dalam bidang perikanan, taman nasional, kawasan dilindungi (*protected area*), kehutanan, hidupan liar *(wildlife),* lokasi pengembalaan dan sumberdaya air. (Borrini-Feyerabend, *et al* 2007) mendefenisikan konsep 'ko-manajemen' sebagai suatu kondisi, dua atau lebih aktor sosial bernegosiasi, memperjelas dan memberikan jaminan di antara mereka serta membagi secara 'berimbang' fungsi pengelolaan, hak dan tanggungjawab dari suatu daerah teritori atau sumber daya alam tertentu yang diberi mandat untuk dikelola.

Berdasarkan pengertian di atas, maka 'kolaboratif manajemen' dapat diartikan sebagai kemitraan di antara berbagai pihak yang berkepentingan, yang menyetujui untuk berbagi fungsi, wewenang dan tanggung-jawab manajemen dalam mengelola daerah atau sumber daya alam yang statusnya dilindungi atau dikonservasi (Borrini-Feyerabend *et al*, 2007).

2.2.2 Kolaborasi dalam Pengelolaan Hutan

Kolaborasi adalah suatu proses dimana dua *stakeholder* atau lebih yang berbeda kepentingan dalam satu persoalan yang sama menjajaki dan bekerja

melalui perbedaan-perbedaan untuk bersama-sama mencari pemecahan bagi keuntungan bersama (Gray, 1989).

Kolaborasi dibutuhkan pada setiap level organisasi, karena pada hakekatnya kolaborasi adalah suatu kerjasama. Kolaborasi dapat berlangsung dalam dua konteks, yaitu di dalam organisasi (internal organisasi) serta kerjasama eksternal organisasi atau *interorganizational relations* yang dilakukan beberapa organisasi (dua atau lebih) dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan kolaboratif Tahura adalah pelaksanaan kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam kawasan Tahura guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Tahura secara bersamaan dan bersinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama (Mayasari, 2015). Pengelolaan kolaborasi juga dikenal sebagai salah satu pendekatan yang bukan bersifat permusuhan (*non adversarial approach*) untuk penyelesaian permasalahan dan penyelesaian konflik, sehingga dalam prakteknya kolaborasi banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pemangku kepentingan dalam konflik multipihak (Winara, 2011).

Upaya-upaya penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya hutan selama ini belum berhasil menyelesaikan konflik secara komprehensif. Wulandari, (2011) menyebutkan bahwa konflik pengelolaan sumberdaya alam sebagai buah dari *missmanagement* dalam pengelolaan hutan dengan demikian memerlukan suatu alternatif manajemen pengelolaan hutan. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak pula. Dengan demikian, kolaborasi itu merupakan resolusi konflik yang akan menghasilkan

situasi ”menang-menang” dan sama sekali tidak mempertimbangkan suatu keputusan atau kesepakatan yang bersifat *zero-sum* seperti yang ditunjukkan Wulandari dan Sumarti, (2011).

Menurut Gray, (1989), lima ciri penting yang menentukan proses kolaborasi meliputi:

1. Membutuhkan keterbukaan, karena dalam kolaborasi antara *stakeholder* harus saling memberi dan menerima untuk menghasilkan solusi bersama
2. Menghormati perbedaan dan menjadikan sumber potensi kreatif untuk membangun kesepakatan
3. Peserta dalam kolaborasi secara langsung bertanggung jawab untuk pencapaian kesepakatan tentang jalan keluar.
4. Membutuhkan satu jalan keluar yang disepakati untuk arahan interaksi diantara *stakeholder* dimasa depan.
5. Membutuhkan kesadaran bahwa kolaborasi adalah suatu proses dari pada sebagai resep.

Kerjasama *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan konservasi akan meringankan beban karena keterkaitan para pihak akan saling memberi masukan, menyumbangkan sumberdaya yang dimilikinya berupa pengetahuan, tenaga, informasi dan finansial.

Walaupun pendekatan kolaborasi telah memberikan kesuksesan dan manfaat dalam menyelesaikan masalah, tetapi dalam perjalanannya terdapat kendala sebagai keterbatasan dari pendekatan kolaborasi. Menurut (Gray, 1989) beberapa kendala dalam kolaborasi, yaitu :

1. Komitmen kelembagaan tertentu menimbulkan disinsentif untuk berkolaborasi.
2. Sejarah hubungan yang dicirikan oleh interaksi permusuhan yang telah berlangsung lama diantara dua pihak.
3. Dinamika perkembangan tingkat kemasyarakatan (pendekatan kolaborasi lebih sulit dipraktekkan ketika kebijakan rendah sekali perhatiannya dalam mempertimbangakan alokasi sumberdaya langka).
4. Perbedaan persepsi atas resiko.
5. Kerumitan yang bersifat teknis
6. Budaya kelembagaan dan politik.
7. Proses partisipasi masyarakat memberi partisipasi informasi yang mereka butuhkan dengan cara yang bermakna.

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan memiliki tujuan masing-masing dalam pengelolaan kawasan. Menurut Prabowo dkk, (2015), mendefinisikan stakeholder adalah mereka yang memiliki hak dan kepentingan dalam sebuah sistem. *Stakeholder* dapat berupa perorangan, komunitas, grup sosial, atau organisasi.

Stakeholders didefinisikan sebagai pihak-pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang diambil Fairuza, (2017) atau dapat pula didefinisikan sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan.

Berdasarkan keterkaitannya terhadap suatu keputusan atau suatu kegiatan kemudian membedakan *stakeholders* menjadi dua yaitu *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu sumberdaya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi. (Handayani dan Warsono, 2017), *stakeholders* ini disebut juga sebagai *stakeholders* kunci (*key stakeholders*). *Stakeholders* sekunder adalah pihak yang memiliki minat/kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumberdaya.

Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi Tahura Sulteng tentu saja tidak hanya berasal dari satu peran *stakeholder* semata, *stakeholder* yang terkait dalam pengembangan dan pengeloaan di Tahura Sulteng melakukan kolaboratif. kolaboratif yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik untuk menghasilkan tindakan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Tindakan kolaboratif ini dilakukan melalui proses klarifikasi perbedaan dan bukan sekedar mengakomodasikan kepentingan tetapi kolaboratif juga merupakan resolusi konflik.

2.2.3 Kawasan Konservasi

Menurut Hidayah, (2008), kawasan hutan Sulawesi Tengah mencakup 69,01 % dari luas provinsi. Hutan ini terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Di antara jenis kawasan hutan tersebut, hanya kawasan hutan produksi yang dapat dikelola secara intensif. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam, Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sedangkan, kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dan taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Tahura selain diatur dalam UU No. 5/1990 antara lain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Permenhut P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana.

Permasalahan yang dialami oleh hampir semua kawasan konservasi di Indonesia adalah permasalahan interen pengelolaan dan permasalahan dengan keberadaan masyakarakat sekitar kawasan. Permasalahan interen pengelolaan kawasan biasanya berkaitan dengan manajemen populasi tumbuhan dan satwaliar, peningkatan kualitas habitat, manajemen wisata, dan profesionalisme pengelolaan kawasan. Permasalahan yang diakibatkan dengan keberadaan masyarakat sekitar kawasan dapat berupa pemukiman penduduk di dalam kawasan, penggunaaan kawasan untuk kepentingan lain, pengembalaan ternak dalam kawasan, pengambilan dan perburuan hasil hutan secara tidak terkendali. Permasalahan yang datang dari luar kawasan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Masuknya seseorang ke kawasan hutan untuk mengambil hasil hutan disebabkan oleh terdesak kebutuhan sehari-hari, sumberdaya alam tersebut tidak tersedia disekitar mereka, tingkat kepemilikan tanah yang rendah, kesempatan kerja dan produktivitas lahan rendah (Prabowo, 2010).

Pemerintah Daerah dan pihak pengelola UPTD Tahura Sulteng telah memiliki upaya dalam pengelolaan hutan lestari di Tahura Sulteng pada tahun 2015 menetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Gubernur sebagai kejelasan impelementasi kebijakan pengelolaan hutan pada Tahura Sulteng. Adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2015 (8 mei 2015) tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah,

1. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67 tahun 2015 September (2015) tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan Taman Hutan Raya Sulwesi Tengah,
2. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 68 tahun 2015 tentang tata cara koleksi kekayaan keanekaragaman hayati pada Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah,
3. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 69 tahun 2015 tentang tata cara pemanfaatan tradisional pada Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.

2.2.4 Masyarakat di Kawasan Konservasi

Masyarakat hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan yang mata pencaharian dan lingkungan hidupnya sebagian besar bergantung pada eksistensi hutan dan kegiatan perhutanan (Arief, 2001). Mereka umumnya bebas memungut dan memanfaatkan hasil hutan baik di dalam hutan produksi maupun hutan lindung (Departemen Kehutanan, 1990)

Menurut Lahandu, dkk, (2016) pengelolaan Tahura Sulteng masih berpegang pada pengelolaan preservasi tanpa memperbolehkan aktivitas lain di sekitar dan dalam kawasan, sementara fakta menunjukan terdapat ratusan hektar lahan milik dan komunal serta ribuan jiwa penduduk penghuni dengan aktivitas usaha tani dan sejumlah kearifan yang dimiliki dalam mengelola sumberdaya alam. Keadaan inilah yang menjadi salah satu timbulnya proteksi masyarakat terhadap lahan-lahan yang defaktonya telah dimiliki secara turun temurun sementara pihak pemerintah daerah tidak memberikan kesempatan bagi pemilik

lahan melakukan akses dari kepemilikan berbagai bukti berupa tanaman keras dan sumberdaya lainnya.

Peran hasil hutan tidak hanya dari segi ekologis, tetapi juga pada aspek ekonomis dan sosial budaya. Dari aspek ekonomis, hasil hutan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan dari aspek sosial budaya, masyarakat ikut dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengolahan Tahura (Salaka, *et al*. 2012 dalam Neil, 2016).

Menurut Neil, (2016), disatu sisi ketergantungan terhadap keberadaan hutan akan menjadi insentif bagi masyarakat untuk memeliharanya; didasarkan pada berbagai kearifan lokal yang diyakini secara turun temurun. Namun di sisi lain, akibat desakan kebutuhan yang semakin meningkat serta adanya faktor faktor lain justru akan menjadi pemicu perambahan hutan. Peraturan perundangan yang berlaku memang memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan (termasuk memanfaatkan hasil hutan), namun harus mematuhi berbagai ketentuan dan rambu-rambu yang berlaku.

Masalah yang diakibatkan dengan keberadaan masyarakat sekitar kawasan Tahura Sulteng berupa pemukiman penduduk di dalam kawasan, penggunaaan kawasan untuk kepentingan lain, seperti berkebun, pengembalaan ternak dalam kawasan, pengambilan dan perburuan hasil hutan secara tidak terkendali. Permasalahan yang datang dari luar kawasan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Masuknya seseorang ke kawasan hutan untuk mengambil hasil hutan disebabkan oleh terdesak kebutuhan sehari-hari, sumberdaya alam tersebut tidak tersedia disekitar mereka, tingkat

kepemilikan tanah yang rendah, kesempatan kerja dan produktivitas lahan rendah (Soekmadi, 2003).

Di wilayah Desa Nagatabaru seringkali terjadi perambahan hutan berupa pengambilan bahan kayu bakar dari tanaman reibosasi dan penghijauan, di Kelurahan Poboya, Kawatuna, Tondo dan Layana Indah, areal kawasan Tahura telah menjadi lahan penggembalaan liar untuk jenis ternak kambing dan sapi, sehingga gangguan utama penyebab kegagalan reboisasi di wilayah tersebut adalah hama ternak dan kesadaran pemilik ternak (Kurnijanto, 2013).

Mangandar, (2000), mengemukakan bahwa interaksi masyarakat dengan kawasan yang dilindungi dapat diarahkan pada suatu tingkat integrasi dimana keperluan masyarakat akan sumberdaya alam dapat dipenuhi tanpa mengganggu atau merusak potensi kawasan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam banyak pihak yang berkepentingan didalamnya, karena banyak manfaat yang diberikan oleh sumberdaya alam tersebut khususnya di kawasan Tahura Sulteng. Konversi lahan hutan ke lahan pertanian oleh masyarakat Desa Ngatabaru sekitar kawasan Tahura Sulteng menyebabkan perubahan fungsi hutan yang dapat mengancam kelestarian hutan dan lingkungan. Lahandu (2007), keberadaan Dusun Tompu merupakan penduduk asli dari suku Kaili yang berada dalam kawasan hutan Tahura. Masyarakat setempat telah mengklaim keberadaan mereka lebih dahulu ada sebelum penetapan kawasan hutan Tahura Sulteng. Saleh (2013) masyarakat nomaden (Suku Kaili) atau petani yang menetap didaerah pegunungan masih

sering melakukan kegiatan illegal loging (pencurian kayu), pembabatan hutan dan pembakaran hutan, hal ini cenderung berdampak kerusakan terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan kawasan Tahura Sulteng telah berlangsung cukup lama di Desa Ngatabaru, sehingga berdampak terhadap kerusakan hutan, turunnya kualitas dan kuantitas air yang terjadi pada Embung Ngia di Desa Ngatabaru. Maka dari itu untuk menjadikan pengelolaan Tahura Sulteng menjadi efektif, perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Tahura dengan model analisis *stakeholder* yang diperkenalkan oleh *Reed et al*. (2009) dengan tiga tahapan yang meliputi identifikasi *stakeholder*, klasifikasi *stakeholder*, dan menggambarkan hubungan antar *stakeholder*. (Suporahardjo, 2005) Analisis kekuatan stakeholder berguna untuk membantu dalam situasi pengembilan keputusan yang disitu terdapat persaingan kepentingan antar stakeholder, sedangkan sumberdaya yang ada jumlahnya terbatas, padahal keperluan para *stakeholder* harus diseimbangkan secara tepat.

Kompleksitas konflik pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura Sulteng tidak dapat diselesaikan oleh pihak pengelola Tahura sendiri melainkan harus berkolaborasi dengan pihak lain agar tujuan pengelolaan Tahura Sulteng terwujud. Pengelolaan secara kolaboratif penting dilakukan dalam upaya pengelolaan kehutanan, sesuai dengan pernyataan (Kobbail, 2010) yang menyatakan bahwa *collaborative management* dari suatu sumberdaya alam dapat dijadikan strategi yang efektif untuk keberlanjutan pengelolaan Tahura Sulteng. Menurut (Schrage dalam Aggranoff, 2003) kolaborasi adalah hubungan yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menciptakan solusi

dalam kondisi keterbatasan informasi, waktu dan ruang. Hal ini serupa dengan pendapat (Grey, 2010) yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses ada kesadaran dari berbagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu permasalahan, kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi. Walaupun pendekatan kolaborasi telah memberikan kesuksesan dan manfaat dalam menyelesaikan masalah, tapi dalam perjalanannya terdapat kendala sebagai keterbatasan dari pendekatan kolaborasi. Menurut Gray (1989) dalam Supohardjo (2005), beberapa kendala dalam kolaborasi, yaitu:

1. Komitmen kelembagaan tertentu menimbulkan disinsentif untuk berkolaborasi.
2. Sejarah hubungan yang dicirikan oleh interaksi permusuhan yang telah berlangsung lama di antara pihak.
3. Dinamika perkembangan tingkat kemasyarakatan (pendekatan kolaborasi lebih sulit dipraktekkan ketika kebijakan rendah sekali perhatiannya dalam mempertimbangkan alokasi sumberdaya langka).
4. Perbedaan persepsi atas resiko.
5. Kerumitan yang bersifat teknis.
6. Budaya kelembagaan dan politik.

Dengan ini perlu diidentifikasi masalah dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan di Tahura Sulteng dengan analisis deskriptif yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan pola kolaborasi penyelesaian konflik di Tahura Sulteng.

Secara sistematika disajikan pada Gambar di bawah ini :

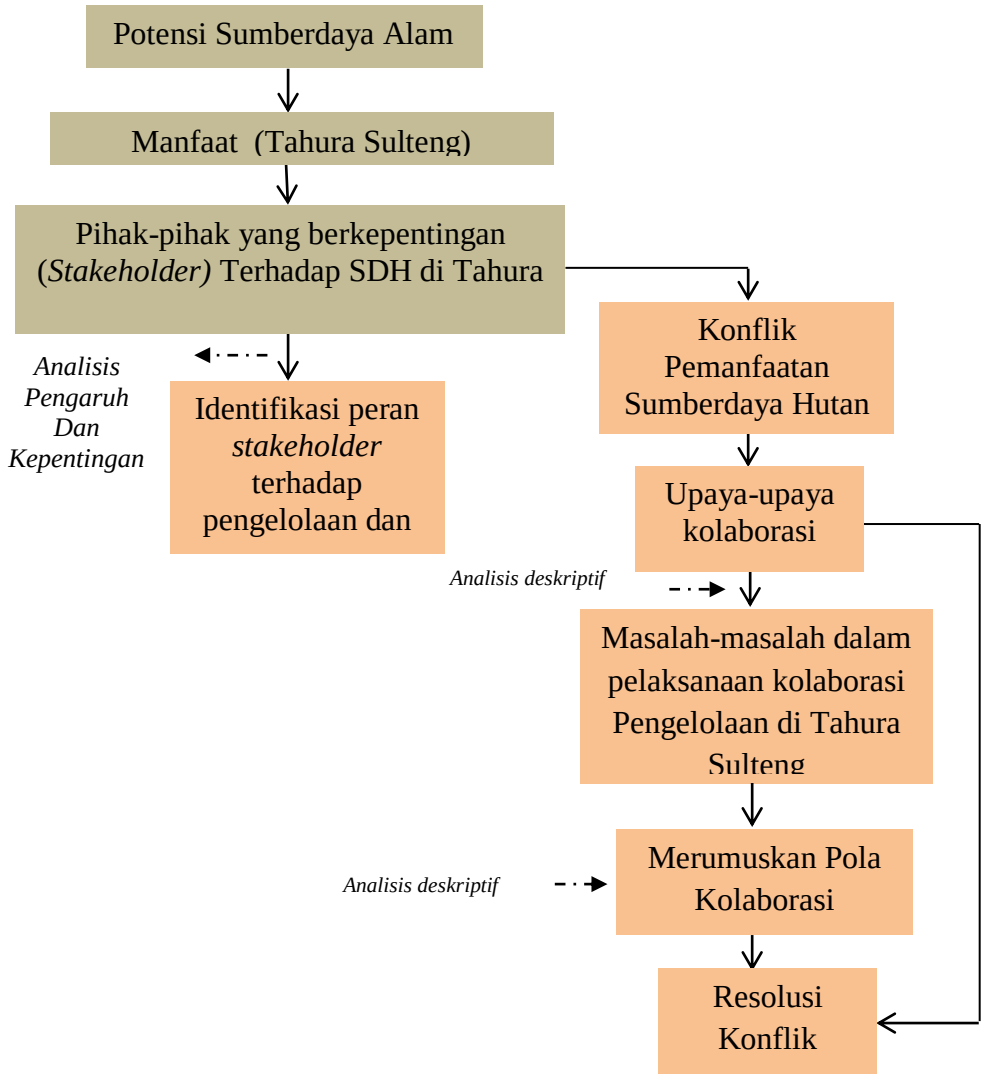

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, arah penelitian adalah penemuan fakta lapangan berdasarkan potensi maupun gejala faktual yang ada di lokasi penelitian.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive,* yaitu penentuan lokasi secara sengaja di Desa Ngatabaru , dengan pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakatnya masih memiliki tingkat ketergantungan dalam pemanfaatan lahan di dalam kawasan dan adanya klaim tenurial masyarakat adat dusun tompu yang berada dalam kawasan hutan Tahura Sulteng. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga bulan) yaitu bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

3.3 Alat dan Bahan

1. Alat yang digun akan terdiri atas:
    1. *Recorder*, untuk merekam proses wawancara;
    2. *Kamera Digital*¸ untuk mendokumentasikan proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan.
    3. *Alat tulis menulis* untuk menuliskan hasil wawancara
2. Bahan yang digunakan:
    1. Quesioner;
    2. Peta lokasi Tahura Sulteng

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam pengelolaan Tahura Sulteng. Pengambilan sampel dilakukan dengan menetetapkan responden secara sengaja (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang di harapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2017). Pengambilan sampel ini didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dimana sampel tersebut adalah masyarakat Desa Ngatabaru, tokoh masyarakat atau pemerintah Desa Ngatabaru, petugas lapangan dan pihak UPTD. Tahura serta stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Tahura Sulteng.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat, pihak Tahura Sulteng. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dari literatur dan dokumen dari berbagai pihak yang diamati sebagai data penunjang.

3.5.1 Data Primer

Data primer dilakukan dengan cara pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara (*interview*) terhadap sejumlah informan kunci. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai para pihak terkait (*stakeholder*) dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura

Sulteng, Sedangkan kegiatan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) setiap *stakholde*r, serta peran *stakeholder* dalam pengelolaan Tahura Sulteng.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder meliputi data potensi desa dan Tahura Sulteng antara lain data geografi, demografi, keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, studi literatur dan dokumen dari para pihak/instansi berupa penggunaan dan pengelolaan Tahura Sulteng.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan sejumlah informan kunci. Informan kunci adalah orang-orang yang memahami permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan Tahura. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari staf UPTD. Tahura (1 orang), staf pengelola Tahura (1 orang), pemerintah Desa Ngatabaru (2 orang) dan masyarakat Desa Ngatabaru (2 orang).

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis *Stakeholder*

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan Tahura Sulteng guna mendapatkan kejelasan peran stakeholder dalam setiap tahapan rencana pengelolaan Tahura agar segala kepentingan stakeholder dapat terakomodasi dan meminimalisir konflik pemanfaatan kawasan Tahura Sulteng yang dapat mengganggu keseimbangan pengelolaan Tahura Sulteng. Analisis *stakeholder* digunakan untuk menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder*.

Pengaruh adalah kekuatan yang dimiliki oleh *stakeholder* terhadap Tahura, sedangkan kepentingan adalah prioritas yang diberikan oleh Tahura untuk memenuhi kebutuhan dari setiap *stakeholder*. Model analisis *stakeholder* yang digunakan merupakan model yang diperkenalkan oleh (*Reed et al*. 2009) dengan tiga tahapan yang meliputi identifikasi *stakeholder*, klasifikasi *stakeholder*, dan menggambarkan hubungan antar *stakeholder*.

3.7.2 Identifikasi *Stakeholder*

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura. *Stakeholder* yang dimaksud adalah instansi pemerintahan, kelompok swasta dan kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.7.3 Klasifikasi *Stakeholder*

Setelah para *stakeholder* terindetifikasi, maka langkah selanjutnya adalah klasifikasi *stakeholder* dengan mengelompokkan dan membedakan antar stakeholder. Menurut Eden dan Ackermann, (1998) diacu dalam *Reed et al*. (2009), metode analisis menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam *key player*, *context setter*, *subject* dan *crowd*. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan kunci yang ditransformasikan menjadi data berupa skoring dan selanjutnya dikelompokkan menurut klasifikasi *stakeholder* tersebut. Penetapan skor menggunakan panduan pengukuran data berjenjang 5 yang dikembang oleh Abbas, (2005) pada tabel 2:

Tabel 2. Ukuran kualitatif terhadap pengaruh dan kepentingan *Stakholder*

No	Skor Nilai	Kriteria	Keterangan
		Pengaruh *Stakeholder*	
1	0-5	Rendah	Tidak mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
4	16-20	Tinggi	Mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat mempengaruhi pengelolaan dan p emanfaatan di Tahura
		Kepentingan *Stakeholder*	
1	0-5	Rendah	Tidak mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
2	6-10	kurang tinggi	Kurang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
4	16-20	Tinggi	Mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura

Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* berupa lima pertanyaan yang diajukan melalui wawancara pada informan kunci,antara lain:

1. Pengaruh Pertama (P1): Bagaimanakah kondisi kekuatan *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfataan SDH di kawasan Tahura ? Kondisi kekuatan *stakeholder* meliputi opini/pendapat, kebudayaan, pendidikan, promosi, aturan/pengawasan. Jika kondisi kekuatannya ≥4 diberi skor 5. Jika kondisi kekuatannya hanya ada tiga di beri skor 4, jika kondisi kekuatannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kekuatannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kekuatannya tidak ada diberi skor 1.

2. Pengaruh Kedua (P2): Bagaimanakah kondisi kelayakan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfataan SDH di kawasan Tahura ? Kondisi kelayakan *stakeholder* meliputi sanksi administrasi, sanksi finansial, sanksi hukum dan sanksi moral. Jika kondisi kelayakannya ≥4 diberi skor 5. Jika kondisi kelayakannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kelayakannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisin kelayakannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kelayakannya tidak ada diberi skor 1.

3. Pengaruh Ketiga (P3): Bagaimanakah kondisi kompensasi *stakeholder* terhadap pengelolaann dan pemanfataan SDH di kawasan Tahura? Kondisi kompensasi *stakeholder* meliputi pemberian gaji/upah, pemberian sebidang lahan, pemberian bantuan/kegiatan, pemberian *award* dan lainnya. Jika kondisi kompensasinya ≥4 diberi skor 5. Jika kondisi kompensasinya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kompensasinya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kompensasinya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kompensasinya tidak ada diberi skor 1.

4. Pengaruh Keempat (P4): Bagaimanakah kondisi kepribadian *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfataan SDH di kawasan Tahura? Kondisi kepribadian *stakeholder* meliputi karisma seseorang, kekuatan fisik, kecerdasan mental, kekayaan dan lainnya. Jika kondisi kepribadiannya ≥4 diberi skor 5. Jika kondisi kepribadiannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kepribadiannya hanya ada dua diberi skor3, jika kondisi kepribadiannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kepribadiannya tidak ada diberi skor1.

5. Pengaruh Kelima (P5): Bagaimanakah kondisi kekuatan organisasi/kelembagaan *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfataan SDH di kawasan Tahura? Kondisi kekuatan organisasi *stakeholder* meliputi kekuatan anggaran (≥30 %), kekuatan SDM (terdapat jenjang sarjana), kesesuaian bidang fungsi, kemampuan menjalin kerjasama/jejaring kerja dan pemberian perijinan. Jika kondisi kekuatan organisasinya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kekuatan organisasinya tidak ada diberi skor 1.

Menurut Reed *et al*, (2009) dalam Oktavia, (2013) Tingkat kepentingan setiap *stakeholder* diukur menggunakan variable yang meliputi keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, bentuk upaya *stakeholder*, program kerja *stakeholder* dan tingkat ketergantungan *stakeholder* dalam pengelolaan Kawasan Tahura. Pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan Tahura berupa lima pertanyaan yang diajukan melalui wawancara, antara lain:

1. Kepentingan Pertama (K1) : Bagaimanakah bentuk keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? Bentuk keterlibatan *stakeholder* meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Jika keterlibatannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika keterlibatan hanya ada tiga diberi skor 4, jika keterlibatan hanya ada dua diberi skor 3 ,jika keterlibatan hanya ada satu diberi skor 2, serta jika keterlibatannya tidak ada diberi skor 1.

2. Kepentingan Kedua (K2) : Manfaat apa sajakah yang diperoleh *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfataan SDH di Kawasan Tahura? Bentuk manfaat yang diperoleh *stakeholder* adalah sebagai sumber penerimaan, menciptakan lapangan kerja, membuka akses, promosi daerah dan mendorong pembangunan daerah. Jika manfaatnya ≥4 diberi skor 5. Jika manfaat hanya ada tiga diberi skor 4, jika manfaat hanya ada dua diberi skor 3, jika keterlibatan hanya ada satu diberi skor 2 , serta jika manfaat tidak ada diberi skor 1.
3. Kepentingan Ketiga (K3): Bagaimanakah upaya *stakeholders* terhadap adanya pengelolaan dan pemanfataan SDH di kawasan Tahura? Bentuk-bentuk upaya *stakeholder* meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan pemberdayaan, pembangunan sarana prasarana, memberikan layanan perijinan, pemberdayaan masyarakat setempat serta penyediaan data dan informasi. Jika kewenangannya ≥4 diberi skor 5. Jika kewenangannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kewenangannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kewenangannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kewenangannya tidak ada diberi skor 1.
4. Kepentingan Keempat (K4): Apa sajakah program kerja *stakeholder* terkait adanya pengelolaan dan pemanfataan SDH di kawasan Tahura? Jika program kerja >20% dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 5. Jika program kerja 16-20% dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 4, jika program kerja 11- 15% dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 3, jika program kerja 6-10% dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 2, serta jika program kerja ≤ 5% dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 1.

5. Kepentingan Kelima (K5) : Bagaimana tingkat ketergantungan *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfataan SDH di kawasan Tahura? Jika tingkat ketergantungan *stakeholder* 81-100% pemanfaatan SDH sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 5. Jika 61-80% pemanfaatan SDH sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 4, jika 41-60% pemanfaatan SDH sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 3, jika 21-40% pemanfaatan SDH sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 2, serta ≤ 20% pemanfaatan SDH sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 1.

Jumlah skor yang didapatkan masing-masing *stakeholder* adalah pengaruh bernilai 25 poin dan kepentingan bernilai 25 poin. Hasil penetapan skor terhadap tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* tersebut dikelompokkan menurut jenis indikatornya dan kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat. Hasil analisis *stakeholder* diklasifikasikan menurut tingkat pengaruh dan kepentingan yang diilustrasikan pada Gambar 2.

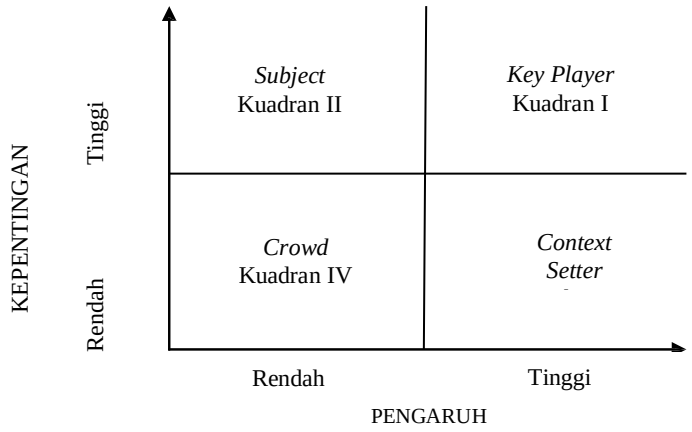

Gambar 2. Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed *et al.* 2009)

3.8 Masalah dalam Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Tahura

Pengelolaan Tahura Sulteng perlu melibatkan berbagai stakeholder, tidak hanya oleh satu stakeholder atau instansi saja, karena dengan pemanfaatan yang berbeda sangat mempengaruhi kelestarian Tahura sulteng. Maka diperlukan suatu pengelolaan dari pihak dengan menyatukan pandangan agar bersama-sama mengelola Tahura Sulteng untuk keberlanjutannya.

Kesuksesan kerja bersama seperti yang diceritakan Suporahardjo, (2005 dalam Wakka (2015), merupakan pelajaran dan pengkayaan metodologi yang berharga dalam perkembangan pendekatan kolaborasi. Tetapi dalam perjalanannya terdapat kendala sebagai keterbatasan dari pendekatan kolaborasi Gray, (1989). Maka dengan tujuan penelitian yang kedua dan ketiga menggunakan analisis deskriptif.

Menurut Linarwati, (2016) metode ini adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. mempelajarai masalah-masalah dalam masyarakat atau stakeholder terhadap suatu pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Tahura Sulteng. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati Maleong, (1997). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan (dikelompokan) dan diurutkan berdasarkan tujuan penelitian. Data yang sudah diurutkan tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan atau mengkaitkan informasi yang diperoleh dari narasumber dengan data hasil pengamatan lapangan dan wawancara.

3.9 Konsep operasional dan pengukuran

Untuk memudahkan penelitian dan analisis penggunaan lahan dan social ekonomi masyarakat, maka peneliti membatasi definisi/konsep operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Manajemen Kolaborasi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan problem dan konflik di Desa Ngatabaru pada kawasan Tahura Sulteng.
2. Resolusi adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah masyarakat Desa Ngatabaru pada kawasan Tahura Sulteng.
3. Konflik lahan atau Tenurial adalah proses sosial masyarakat Desa Ngatabaru dalam pemanfaatan lahan maupun sumber daya hutan di kawasan Tahura Sulteng.
4. Sumber daya hutan adalah segala sesuatu yang berasal dari hutan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik komponen abiotik maupun biotik.
5. Sumber daya alam adalah air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia.
6. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

7. *Stakeholder* merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan memiliki tujuan masing-masing dalam pengelolaan kawasan Tahura Sulteng.
8. Pemanfaatan lahan adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Ngatabaru pada kawasan Tahura Sulteng seperti perkebunan dan pemukiman.

BAB IV
KONDISI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Biofisik

4.1.1 Letak dan Luas

Sesuai SK. Menhutbun Nomor 24/Kpts-II/1999 tanggal 29 Januari tahun 1999, secara geografis Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan 7.128,00 Ha terletak di Kecamatan Mantikulore dan di Kecamatan Sigi Biromaru pada koordinat posisi antara 119º 54’ 00” – 120º 0’ 00” BT dan 0º 48’ 00” – 0º 59’ 00” LS.

Kawasan TAHURA Sulawesi Tengah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan permukiman Dusun Wintu Kelurahan Layana Indah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan permukiman Kecamatan Mantikulore (Dusun Wintu Kelurahan Layana Indah, Dusun Watutela Kelurahan Tondo, Poboya, Lasoani, dan Kawatuna), dan Kecamatan Sigi Biromaru (Desa Ngatabaru, Desa Loru dan Desa Pombewe).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan permukiman Dusun Rorongonau Desa Pombewe.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas (KPHP Model Dolago Tanggunung).

KPA TAHURA Sulteng dengan luas kawasan 7.128,00 Ha melintasi dua wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Di wilayah Kota Palu melintasi wilayah Kecamatan Mantikulore (Kelurahan Kawatuna, Lasoani,

Poboya, Tondo dan Layana Indah), sedang di wilayah Kabupaten Sigi melintasi wilayah Kecamatan Sigi Biromaru (Desa Pombewe, Loru dan Ngatabaru).

4.1.2 Iklim dan Hidrologi

Faktor iklim merupakan salah satu komponen yang menentukan keberhasilan pengelolaan tanaman sekitar hutan. Komponen iklim, selain berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman, juga dapat berpengaruh tidak langsung melalui interakri dengan komponen lain seperti tanah dan lainnya. Kondisi curah hujan Kota Palu dan sekitarnya tahun 2006 (Stasiun Meteorologi Mutiara Palu), curah hujan tertinggi sebanyak 126,30 mm, 135,50 mm dan 111,80 mm terjadi pada bulan Mei, Juni dan Oktober sedangkan curah hujan terendah sebanyak 5,40 mm terjadi pada bulan februari.

Suhu udara rata-rata harian adalah 27,03° C dengan suhu maksimum 35,5° C dan minimum 21,7° C. Tingkat temperatur udara lembah palu secarah umum masih dalam batas kisaran suhu cardinal tanaman, sehingga kondisi temperatur tersebut menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Kondisi hidrologi TAHURA berdasarkan potensi sumberdaya airnya, dari sungai-sungai utama seperti S. Wintu, S. Watutela, S. Paboya, S. Kawatuna, S. Ngia dan S. Paneki, hanya dua sungai utama yang memiliki debit air yang besar dan mengalir sepanjang tahun dari dulu hingga muara yaitu S. Paboya dan S. Paneki. Pola aliran sungai dalam kawasan TAHURA umumnya mengikuti pola dendritik dan pararel.

4.1.3 Keadaan Tanah

Berdasarkan kunci taksonomi tanah Soil Survey Staf (1992), tanah Entisol dan Inseptisol adalah setara jenis Regosol, Aluvial, dan Latosol. Sedangkan tanah

Alfisol setara dengan jenis tanah mediteran, dan Ultisol setara dengan jenis tanah podsolik merah kuning. Tekstur tanah di wilayah TAHURA cukup bervariasi, yaitu terkstur tanah lempung berpasir, lempung. Lempung liat berpasir, liat berpasir, lempung berliat, dan liat berlempung (BKSDA VI Palu 1997).

Di wilayah TAHURA Sulteng seluas 7.128 ha terdapat sebanyak tiga jenis tanah yaitu podsolik merah kuning (PMK), Latosol (LTS), dan *Brown Forest Soil* (BFS). Dari ketiga jenis, podsolik merah kuning adalah jenis tanah yang mendominasi seulruh kawasan TAHURA dengan luas cakupan 6.705,81 ha (94,08%). Adapun jenis tanah latosol dan *brown forest soil* masing-masing hanya mencakup wilayah sempit masing-masing seluas 105,73 ha (1,48%) dan seluas 316,45 ha (4,44%). Jenis tanah latosol hanya terdapat di wilayah DAS Wintu-Bulubiongga, sedangkan jenis *brown forest soil* dijumpai di wilayah DAS Loru.

4.1.4 Kadaan Flora

Berdasarkan hasil inventarisasi Potensi Flora yang dimiliki Tahura Sulteng wilayah kelurahan layana indah, merupakan ekosistem yang khas di tumbuhi oleh Cendana *(santalum album),* Akasia *(Acascia),* serta lengaru *(Aistonia sp),* Asam *(Tamarindus Indicia),* Palem Naga *(Draceana sp)* dan belukar yang terpencar sangat luas. Pada daerah ini juga banyak beberapa Jambu *(Syzigium sp),* Selain itu terdapat pula tanaman perkebunan seperti Kemiri *(Aleurites moluccana),* Coklat *(Theobroma cacao)* dan kelapa *(Cocos nuctifera)* yang merupakan milik masyarakat yang telah ditanam bertahun-tahun sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan TAHURA Sulawesi Tengah.

4.1.5 Keadaan Fauna

Jenis-jenis fauna yang terdapat di kawasan TAHURA Kelurahan Layana Indah dikelompokan menjadi tiga besar yaitu :

1. Jenis Burung *(Aves)*

   Burung gagak *(Corvus Maccorhynchous)*, burung Bontol *(Lonchura Sp)*, burung Layang-layang *(Hirondu Rustica)*, burung Mayar *(Ploceus Filipus)*, Tekukur *(Streptopelicia sp)*, burung Bubut *(Geopelia Striata)*.

2. Jenis Mamalia

   Rusa *(CervusTimorensis)*, Anoa dataran tinggi *(Bubalus Quarsii)*, Monyet *(Macaca tongkeana)*.

3. Reptilia

   Ular sawah *(Phyton Recticulatus)*, Ular Hitam, Ular Hijau, dan Biawak *(Varanus Salvator)*.

4.2 Keadaan Sosial Ekonomi

4.2.1 Kependudukan

Berdasarkan buku profil Kelurahan Layana Indah, diketahui jumlah penduduk desa yaitu tercatat sebanyak 848 KK atau penduduk mencapai 3894 jiwa yang terdiri dari 2.020 jiwa Laki- laki dan 1.877 jiwa Perempuan.

4.2.2 Keadaan Ekonomi

Tradisi alam suatu daerah akan berpengaruh terhadap aktifitas mata pencaharian mayarakat setempat. Selain faktor kondisi alam, mata pencarian dipengaruhi oleh potensi sosial dan ekonomi berupa kepadatan penduduk, keberadaan pasar dan sastra-sastra ekonomi lainnya. Mata pencarian pokok

penduduk sebagian besar berada di sektor pertanian dimana sebagiaan besar masyarakat bekerja sebagai petani, sementara masyarakat yang lain bekerja sebagai pegawai negeri, wiraswasta, pertukangan, buru tani dan pensiunan. Selain itu dengan seiring banyaknya perniagaan yang terjadi di Kelurahan Layana Indah sedikit banyaknya menimbulkan efek rangsangan para usahawan yang ingin mengelola lahan sebagai tempat berwiraswasta.

4.2.3 Agama dan Adat Istiadat

Masyarakat Kelurahan Layana Indah pada umumnya merupakan penduduk asli yaitu Suku Kaili dimana masyarakat hampir seluruhnya beragama Islam dan lebih berpegang teguh terhadap hukum dan adat istiadat yang sudah ada sebelumnya dan sudah turun temurun.

4.2.4 Pendidikan

Taraf hidup atau tingkat kemakmuran suatu masyarakat dalam suatu wilayah akan tercemin dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Secara umum pendidikan adalah merupakan faktor penentu tinggi rendanya tingkat sosial pada masyarakat. Bidang pendidikan sangat erat kaitannya dengan tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh suatu masyakat, karena bidang ini sangat mempengaruhi cara manusia berpikir dan mensensitifkan masyarakat desa kepada suatu kemajuan atau pembangunan, khususnya dalam pembangunan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kelurahan Layana Indah termasuk dalam kategori menengah, hal ini bisa dijadikan acuan agar perintah setempat lebih peduli lagi dalam hal meningkatkan dan memeratakan pendidikan bagi masyarakat.

4.2.5 Aksesibilitas

Untuk mencapai kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya) Sulawesi Tengah khususnya di Kelurahan Layana Indah jarak yang perlu ditempuh hanya sekitar ± 7 Km dari Kota Palu dengan kondisi jalan aspal yang baik dan dapat ditempu dengan mengunakan kendaraan roda dua atau roda empat, sehingga mempunyai peluang besar untuk dikunjungi.

4.3 Kondisi Biofisik Lokasi Desa Ngatabaru

4.3.1 Letak Geografis

Berdasarkan administrasi pemerintah Desa Ngatabaru berada diwilayah kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Secara geografis berada pada koordinat 119º56'48" - 119º57'24"BT dan 0º55'16" - 0º55'50"LS dengan luas 224, 32 km^2 yang terdiri dari 4 Dusun dan 7 RT. Desa Ngatabaru memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Kawatuna Kota Palu
- Sebelah Selatan : Desa Loru Kabupaten Sigi
- Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong
- Sebelah Barat : Kelurahan Petobo Kota Palu

4.3.2 Topografi dan Geologi

Menurut BPS (2019) keadaan topografi di Desa Ngatabaru bervariasi mulai dari dataran (80%). perbukitran (15%). Sampai pegunungan (5%) dengan ketinggian 257m diatas permukaan laut.

Keadaan Geologi Desa Ngatabaru yaitu memiliki jenis tanah alluvial atau lempung pasir dengan formasi geologi yang terdiri dari batuan gunung berapi

batuan terobosan yang tidak membeku *(innous interusive rocks)*, batuan metamorphosis sedimen.

4.3.3 Kondisi Lingkungan

Kondisi iklim Desa Ngtabaru pada umumnya hampir sama denga desa-desa lainnya yang ada dikabupaten Sigi Biromaru. Hasil pencatatan Stasiun Meteorologi Mutiara Palu adalah sebagai berikut, suhu udara rata-rata tertinggi pada bulan Oktober sebesar 28,1^{o}C. Kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Mei 2018 yaitu 82% sedangkan rendah terjadi pada bulan Februari yaitu 71%. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni, yakni 135,5mm dan terendah pada bulan februari 35,40mm. kecepatan angina rata-rata berkisar 4,5 knots. Berdasarakan klasifikasi iklim Smith dan Fergurson, termasuk dalam tipe iklim F (BPS 2019).

4.3.4 Penggunaan Lahan

Sesuai data wawancara dan identifikasi di lapangan, penggunaan lahan di Desa Ngatabaru umumnya merupakan kawasan hutan dan padang rumpun, selain itu penggunaan lahan diperuntukan sebagai lahan pertanian, perkebunan, pemukiman penduduk dan prasarana umum.

Secara umum, keadaan pertanian di Desa Ngatabaru yang diusahakan penduduk terutama sayur-sayuran dan hasil hutan bukan kayu. berdasarkan data dari kantor Balai Desa Ngatabaru tahun 2019, luas Tanah perkebunan menurut sumber pengairannya meliputi irigasi sederhana 1 ha dan embung 1 ha. Di samping itu, Desa Ngatabaru memiliki beberapa jenis ternak yang diusahakan masyarakat seperti tercantum pada Tabel 3:

Tabel 3: Jenis dan jumlah Ternak di Desa Ngatabaru

No	Jenis ternak	Jumlah
1	Ayam	175
2	Kambing	1014

Sumber : Monografi Desa Ngatabaru, 2019

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi dan Keyakinan Masyarakat

4.4.1 Kependudukan

Kepadatan penduduk sesuai data monografi Desa Ngatabaru Tahun 2019 berkisar 4705 jiwa/km^2 dengan 378 kepala kelurga dari 1662 jiwa jumlah penduduk. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki 861 jiwa dan perempuan 761 jiwa.

4.4.2 Mata pencaharaian

Keadaan mata pencaharaian penduduk di Desa Ngatabaru umumnya adalah petani. Jenis mata pencaharaian lainnya adalah pegawai negeri, pedangang dan tukang bangunan juga usaha batu bata. Secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4: Mata pencaharian Penduduk di Desa Ngatabaru

NO	MATA PENCAHARAIAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Petani	150	70.75
2	Peternak	11	5,19
3	Pedagang	20	9,43

Sumber : Monografi Desa Ngatabaru 2018

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Ngatabaru didominasi oleh petani 150 jiwa (70,75%).

4.4.3 Tingkat Pendidikan

Kondisi tingkat pendidikan penduduk Desa Ngatabaru mulai yang berpendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), SLTP/Sderajat SMU/Sedearajat dan perguruan tinggi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5: Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Ngatabaru

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	SD	85	53,80
2	SLTP	50	31,64
3	SLTA	18	11,39
4	PT	158	100

Sumber: Data BPS Kec. Sigi Biromaru Desa Ngatabaru, 2019

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Ngatabaru yang berpendidikan SD 53,80%, SLTP 31,64%, SLTA 11,39, dan perguruan Tinggi hanya 3,16%.

4.4.4 Agama

Masyarakat Desa Ngatabaru memiliki keyakinan yang berbeda–beda, berdasarkandata monografi Desa Ngatabaru Tahun 2019 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduknya beragama islam (95) dan selebihnya beragama Kristen (5%). Di Desa Ngatabaru telah dibangun sarana beribadah berupa 2 mesjid dan 1 Gereja. (BPS Sigi Biromaru Desa Ngatabaru, 2019).

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Konflik Tahura Sulteng

Konflik muncul dengan adanya perbedaan pandangan atau kepentingan. Perbedaan pandangan antara satu dan yang lain mengakibatkan keduanya saling te ganggu. Akibat dari situasi dimana keinginan yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Kilman dan Thomas (1978), konflik merupakan suatu kondisi ketidak cocokan antar nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik dalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain.

Konflik yang terjadi di BKPH Tanggung juga disebabkan oleh perbedaan tujuan (incompatible goals) antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani. Masyarakat memerlukan lahan atau hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara Perhutani diberi tugas untuk mengelola lahan hutan untuk memberikan keuntungan bagi negara dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan tujuan tersebut dilandasi oleh perebutan sumberdaya hutan (contest over resources), dan perbedaan peran (incompatible roles) antara dua pihak yang berkonflik sebagaimana yang dikemukakan (Bartos dan Wehr, 2002).

Beberapa Isu konflik yang teridentifikasi di kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah di Desa Ngatabaru yaitu:

Konflik Tenurial, merupakan konflik umum yang terjadi pada kawasan hutan, tidak terkecuali pada kawasan Tahura. Berkaitan dengan klaim masyarakat,

belum adanya tata batas yang jelas dan terbatasnya akses masyarakat dalam kawasan konservasi Tahura. Konflik yang ada di Tahura memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat sekitar kawasan Tahura yang bergantung pada hasil pertanian dan hasil hutan bukan kayu pada sekitar kawasan hutan (Golar *et al*, 2014).

Kegiatan illegal pemanfaatan lahan dan hasil hutan di kawasan Tahura, adanya penggunaan lahan dengan okupasi alih fungsi lahan oleh masyarakat Desa Ngatabaru. adanya perambahan, seperti perbekebunan, peternakan, dan yang berkaitan dengan masalah kehidupan yang terjadi di kawasan Tahura. Pemanfaatan Hasil hutan seperti pengambilan kayu untuk dijadikan arang.

Tata kelola yang terdiri dari minimnya nilai manfaat yang diberikan Tahura Sulteng kepada masyarakat desa setempat. Menurut Grimble, (1997) banyak inisiatif konservasi gagal karena mereka tidak memperhatikan interests dan karakteristik pemangku kepentingan. Mushove, (2005) menganalisis pemangku kepentingan telah mendapatkan perhatian meningkat dan sekarang integral banyak inisiatif pengelolaan sumber daya alam partisipatif.

Beberapa hal yang bisa dikaji dalam mengoptimalkan peran *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura, pihak mana saja yang memiliki pengaruh dan kepentingan dan harus dilibatkan dalam alur proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan Tahura Sulteng, agar pelaksanaan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dan fungsi Tahura Sulteng.

5.2 *Stakehoder* yang terlibat dalam pengelolaan Tahura Sulteng

Pengelolaan Tahura Sulteng ditentukan oleh peran masing-masing *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap kawasan Tahura Sulteng. Pengaruh antar stakholder dalam pengelolaan Tahura terjadi karena masing masing stakeholder memiliki kepentingan diantaranya kepentingan pemanfaatan lahan, dan pemanfaatan hasil hutan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap *stakeholder* yang mempunyai kepentingan di kawasan ditemukan 12 *stakeholder*. Antara lain Balai Wilayah Sungai Sulawesi III; Dinas Kehutanan Slteng; Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu; UPTD Tahura; Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan; Penyuluh Pertanian; Pemerintah Desa; Masyarakat Desa Ngatabaru; Kelompok Tani Hutan; Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengeloaan Tahura Sulteng disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6: Peran *Stakeholder* yang terlibat dalam pengeloaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulteng

No	*Stakeholder*	Peran	Entitas
1	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III	Pengelolaan wilayah sungai pada embung ngia di Kawasan Taman Hutan raya	Kelompok Pemerintah
2	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu	Pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan	Kelompok Pemerintah
3	Dinas Kehutanan Sulteng	Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Kelompok Pemerinta
4	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Pelaksana teknis pengelolaan Tahura Sulteng	Kelompok Pemerinta
5	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Pemberdayaan masyarakat melalui pembagian bibit pertanian	Kelompok pemerintah
6	Penyuluh Pertanian	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok pemerintah
7	Pemerintah Desa Ngatabaru	Pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat	kelompok pemerintah
8	Masyarakat Desa Ngatabaru	Pemberdayaan dan pengelolaan kawasan Tahura	Kelompok masyarkat
9	Kelompok Tani Hutan	Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kawasan Tahura	Kelompok masyarakat
10	Lembaga Adat Setempat	Pembinaan dan pengawasan	Kelompook masyarakat
11	Perguruan Tinggi	Penelitian, pengabdian dan pembinaan masyarakat	Kelompok akdemis
12	Lembaga Swadaya Masyarakat	Pendampingan dan pembinaan masyarakat	Kelompok swasta

Sumber Data : Diolah 2019

Berdasarkan hasil penelitian Iskandar, (2015) Identifikasi para pihak perlu dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. beberapa diantaranya berpendapat bahwa *stakeholder* yang ada merupakan pihak yang berkaitan langsung karena adanya kepentingan dan

tujuan yang sama dalam pola kemitraan dan ada para pihak yang melakukan koordinasi berdasarkan wewenang pekerjaan. Sementara itu menurut Race dan Millar, (2006) pemangku kepentingan (*stakeholders*) didefinisikan sebagai individu, masyarakat, atau organisasi yang secara potensial dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau kebijakan. *stakeholders* mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan memperoleh manfaat atau sebaliknya dari suatu proses pengambilan keputusan.

Manajemen kebijakan dan kepentingan dalam pengelolaan hutan dipandang sebagai pengembalian kekuasaan yang lebih besar kepada masyarakat lokal dan pengakuan otoritas manajemen secara formal. Pengelolaan hutan dengan memadukan berbagai kebijakan dan kepentingan dapat dilakukan melalui pelibatan *stakeholders* dalam pengelolaan Tahura. Berdasarkan Permenhut Nomor 19 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pengelolaan kolaboratif, dalam pasal 4 disebutkan bahwa pihak mitra dapat berupa pemerintah pusat seperti UPTD. Tahura, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kelompok masyarakat setempat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari beberapa pihak tersebut, pihak yang berkaitan dengan kerjasama dalam pengelolaan hutan.

5.2.1 Entitas Kelompok Pemerintah

Pengelolaan Tahura Sulteng tidak terlepas dari kewenangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 12 (Dua belas) *stakeholder* yang berasal dari kelompok pemerintah, antara lain, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawasi Tengah mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan Tahura Sulteng, peran Dishut Sulteng sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah Nomor 2 Tahun 2015 adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pembinaan merupakan salah satu peran yang dimiliki oleh Dishut Sulteng. Dalam peran ini pembinaan yang dimaksud adalah usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengelolaan Tahura Sulteng, Selain pembinaan, peran Dishut adalah pengawasan yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pengelolaan Tahura Sulteng. Selain itu peran Dishut juga adalah melakukan pengendalian terhadap segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitan dan pemantauan untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan Tahura Sulteng.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Sulteng adalah kelompok *stakeholder* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Tahura. UPTD Tahura dalam PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah mempunyai peran antara lain melakukan perencanaan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Perencanaan yang dimaksud antara lain melakukukan inventarsasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan perencanaann pengelolaan. Perlindungan sebagian dimaksud dalam PERDA No 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah adalah mencegah dan mengatasi terjadi kerusakan kawasan Tahura Sulteng yang disebabkan aktivitas manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit; mempertahanakan dan menjaga hak negara, masyarakat dan

perorangan atas kawasan Tahura Sulteng dan perangkat yang berhubungan dengan Tahura Sulteng.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan dan Penyuluh Pertanian mempunyai peran dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Ngatabaru. Melalui program pembagian bibit tanaman pertanian dan pembagian ternak kambing dan pendampingan diharapkan masyarakat tidak sepenuhnya menggantungkan hidup pada kawasan Tahura. Sehingga kelestareian ekosistem dapat terjaga dengan baik.

Pada kawasan Tahura Desa Ngatabaru terdapat waduk air yang merupakan satu satunya sumber air bersih untuk masyarakat. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III mempunyai peran dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih untuk masyarakat Desa Ngatabaru dan pasokan air untuk pengembangan wisata alam Kapopo. Jika mengacu pada PERDA No 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah maka peran *stakeholder* ini sangat berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem dan pengembangan wisata Kapopo. Namun, selama ini pelaksanaan program kolaborasi pengelolaan Tahura belum terjalin membangun pola kemitraan atau kolaborasi aktif *stakeholder* berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam mendukung pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA). Dukungan yang diharapkan masyraakat Desa Ngatabaru terhadap Tahura adalah meningkatkan kerjasama, komunikasi, pihak pengelola Tahura dengan melibatkan kelompok masayarakat sekitar kawasan Tahura.

5.2.2 Entitas Kelompok Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok *Stakeholder* yang tidak bisa terlepas dalam pengelolaan Kawasan Hutan. Dewi, (2012) menyatakan bahwa pada era reformasi dan otonomi daerah, hutan lindung dan hutan konservasi mengalami tekanan yang sangat kuat dari dalam (penebangan liar, kebakaran) maupun luar untuk kepentingan berbagai alternatif penggunaan lain (misal, konversi ke tambang), sehingga fungsi lindungnya banyak yang terganggu dan tidak optimal. Kecenderungan masyarakat dalam melakukan aktivitas di dalam kawasan Tahura dikarenakan dinamika perekonomian masyarakat. Masyarakat menganggap dengan melakukan kegiatan pemafaatan hutan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga membuat sebagian masyarakat untuk melakukan aktivitas baru pemanfaatan hutan.

Kelompok *stakeholder* masyarakat terdiri dari masyarakat Desa Ngatabaru dan Kelompok Tani Hutan Desa Ngatabaru, kedua stakeholder ini mempunyai kepentingan dan ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan Tahura. Sehingga pemberian akses sangat dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan hutan untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015 pemberian akses pemanfaatan adalah pemberian izin untuk melakukan pengumutan hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisonal dan izin penguasaan jasa wisata alam. Namun demikian pemberian akses ini perlu pendampingan penuh baik dari Pihak UPTD. Tahura maupun Pemerintah daerah. Sehingga pemberian akses ini tidak berdampak negatif pada kawasan Tahura Sulteng. Namun, setelah dilakukan penelitian secara actual di

dalam kawasan Tahura masih dijumpai aktivitas perambahan hutan seperti pencurian fasilitas yang ada di Tahura.

Hasil penelitian Semu, (2018), Keterlibatan dan peran masyarakat sekitar DAS Lisu sangat penting dalam pengelolaan DAS Lisu. Peran masyarakat dimana mulai dari hulu sampai hilir, masyarakat harus mengetahui bentuk tindakan-tindakan disekitar DAS Lisu mulai dari pemanfaatan dan pengelolaan di sekitar DAS Lisu. Pengelolaan DAS Lisu harus memiliki kesepakatan bersama oleh setiap stakeholder. Hal ini belum kita liat di DAS Lisu dimana keterlibatan semua aspek belum berkolaborasi dan bersinergitas dalam pengelolaan DAS Lisu.

5.2.3 Entitas Kelompok Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi merupakan kelompok *Stakeholder* yang masuk dalam pengelolaan Tahura Sulteng. Perguruan Tinggi mempunyai peran dalam penelitian dan pengembangan ilmu serta pemdampingan kepada masyarakat. Dalam PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmih secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran dan ketidak benaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan.

Perguruan Tinggi mempunyai Hak untuk melakukan penelitian dalam kawasan Tahura Sulteng dengan ketentuan harus mempunyai izin penelitian. Izin penelitian yang diberikan berjangka 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan. Pemegang izin penelitian dapat menggunakan sarana dan prasaran yang telah

disediakan oleh pihak UPTD Tahura Sulteng. Meskipun demikian, sebagaian peneliti mengganggap bahwa pembatasan waktu yang diberikan belum memadai.

Perguruan Tinggi tingkat tanggung jawabnya tidak terlalu besar karena kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penelitian pada Tahura masih tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan tupoksi dalam pengelolaan Tahura tidak diatur secara khusus, *stakeholder* tersebut tidak memiliki tupoksi yang terkait langsung dengan fungsi pengelolaan Tahura. Selama perguruan tinggi yang melakukan aktivitas adalah Universitas Tadulako dan selama ini tanggung jawab yang dilakukan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan program. Diharapkan adanya perguruan tinggi dalam menjalin kerja sama dalam hal penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Tahura.

5.2.4 Entitas Kelompok Lembaga Swadaya Masyakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) merupakan *stakeholder* yang mempunyai peran dalam pengelolaan Tahura. Peran dari *stakeholder* ini adalah melakukan pendampingan hak-hak masyarakat. Pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kepasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Tahura Sulteng.

Bagi LSM tanggung jawabnya tidak terlalu besar karena kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Tahura masih tergolong rendah. Seperti halnya perguruan Tinggi, LSM juga tidak memiliki tupoksi khusus dalam tingkat fungsi pengelolaan Tahura, stakeholder ini hanya melakukan kegiatan-kegitan pemberdayaan berdasarkan dana swadaya atau bantuan dari pihak pemerintah.

Selama LSM akan melakukan aktivitas ketika adanya isu permasalahan lingkungan dan masyarakat yang terjadi pada daerah setempat. Dengan harapan adanya LSM dapat menjalin kerja sama dalam hal bertambahnya pengetahuan masyarakat di kawasan Tahura.

Hardiyanto, (2013) Selama ini kebijakan yang ditetapkan sering tumpang tindih, hal ini diakibatkan oleh lemahnya koordinasi antar sektor, dan berbagai kerusakan yang terjadi dikawasan cagar alam, bahkan koordinasi antara pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak harmonis walaupun telah berlangsung otonomi daerah.

5.3 Klasifikasi *Stakeholder* dalam Pengelolaan Tahura Sulteng

Klasifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura dibedakan menurut tingkat pengaruh dan kepentingan. Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura Sulteng menggunakan lima variabel yang meliputi kekuatan kondisi, kekuatan kelayakan, kekuatan kompensasi, kekuatan individu dan kekuatan organisasi (Reed *et al*. 2009).

Pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura Sulteng menggunakan lima variabel yang meliputi keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, bentuk kewenangan *stakeholder*, program kerja *stakeholder* dan tingkat ketergantungan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura Sulteng. Hasil perhitungan tingkat pengaruh masing-masing *stakeholder* dengan menggunakan panduan penilaian yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7: Hasil perhitungan nilai tingkat pengaruh *stakeholder*

No	Stakeholder	Nilai					Total
		P1	P2	P3	P4	P5	
1	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III	4	2	1	5	4	16
2	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu	5	0	2	5	4	16
3	Dinas Kehutanan Sulteng	5	5	5	4	5	24
4	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	5	5	3	3	3	19
5	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	3	1	2	5	2	13
6	Penyuluh Pertanian	4	4	3	3	3	17
7	Pemerintah Desa Ngatabaru	3	3	2	2	2	12
8	Masyarakat Desa Ngatabaru	5	5	4	4	4	22
9	Kelompok Tani Hutan	2	3	1	1	1	8
10	Lembaga Adat Setempat	2	3	0	3	3	11
11	Perguruan Tinggi	4	5	3	2	3	17
12	Lembaga Swadaya Masyarakat	2	2	2	2	1	9

Keterangan : P1 = Kekuatan kondisi; P2 = Kekuatan kelayakan; P3 = Kekuatan kompensasi; P4 = Kekuatan individu; P5 = Kekuatan organisasi.

Pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura menggunakan lima variabel yang meliputi keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, bentuk kewenangan *stakeholder*, program kerja *stakeholder* dan tingkat ketergantungan *stakeholder*. Hasil perhitungan tingkat kepentingan masing-masing *stakeholder* dengan menggunakan panduan penilaian yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8: Hasil perhitungan nilai tingkat kepentingan *stakeholder*

No	Stakeholder	Nilai					Total
		K1	K2	K3	K4	K5	
1	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I II	3	3	2	2	2	12
2	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu	2	1	3	4	0	10
3	Dinas Kehutanan Sulteng	5	4	5	4	5	23
4	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	5	5	4	5	5	24
5	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	3	3	2	5	0	13
6	Penyuluh Pertanian	2	2	2	2	1	9
7	Pemerintah Desa Ngatabaru	5	5	4	4	4	22
8	Masyarakat Desa Ngatabaru	4	5	4	4	4	21
9	Kelompok Tani Hutan	4	5	3	4	4	20
10	Lembaga Adat Setempat	2	2	3	2	3	12
11	Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	10
12	Lembaga Swadaya Masyarakat	2	2	2	2	1	9

Keterangan : K1 = Bentuk keterlibatan; K2 = Manfaat yang diperoleh; K3 = Bentuk kewenangan; K4 = Program kerja; K5 = Tingkat ketergantungan.

Ketergantungan masyarakat Desa Ngatabaru akan kawasan Tahura memiliki intensitas yang cukup tinggi. Intensitas yang tinggi disebabkan akses menuju kawasan Tahura mudah untuk diakses masyarakat, selain itu potensi nilai ekosistem atau nilai ekonomi dikawasan Tahura cukup tinggi dan mudah untuk dimanfaatkan dan dipasarkan oleh masyarakat Desa Ngatabaru. selain masyarakat beberapa *stakeholder* juga mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam pemanfaatan kawasan Tahura.

Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Dinas Kehutanan (Dishut) sebagai perpanjangan tangan

Gubernur Sulawesi Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian. Dari PERDA No. 2 Tahun 2015 teridentifikasi bahwa Dishut mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi tehadap kebijakan pemanfaatan sumberdaya Tahura. Selain Dishut, UPTD Tahura juga merupakan stakeholder yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yamg tinggi dalam pemanfaatan Tahura. Pengaruh dan kepentingan yang tinggi dijabarkan dalam PERDA No. 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa UPTD Tahura mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Dengan tupoksi ini jelas bahwa tingkat pengaruh dan kepentingan UPTD Tahura Tinggi.

Hasil analisis data *stakeholder* diklasifikasikan menurut tingkat pengaruh dan kepentingan dengan menggunakan matriks menurut *Reed et al*. (2009) dapat dilihat pada Gambar 3. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tersebut menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki klasifikasi yang berbeda sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura Sulteng.

5.4 Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Tahura Sulteng

Hasil identifikasi *Stakeholder,* ditemukan beberapa stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam kawasan Tahura dan juga mempunyai peran terkait penyelesaian konflik pemanfaatan lahan dan hutan di kawasan Tahura, *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura Sulteng memiliki peran dan posisi yang berbeda-beda menyikapi

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan tersebut. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.

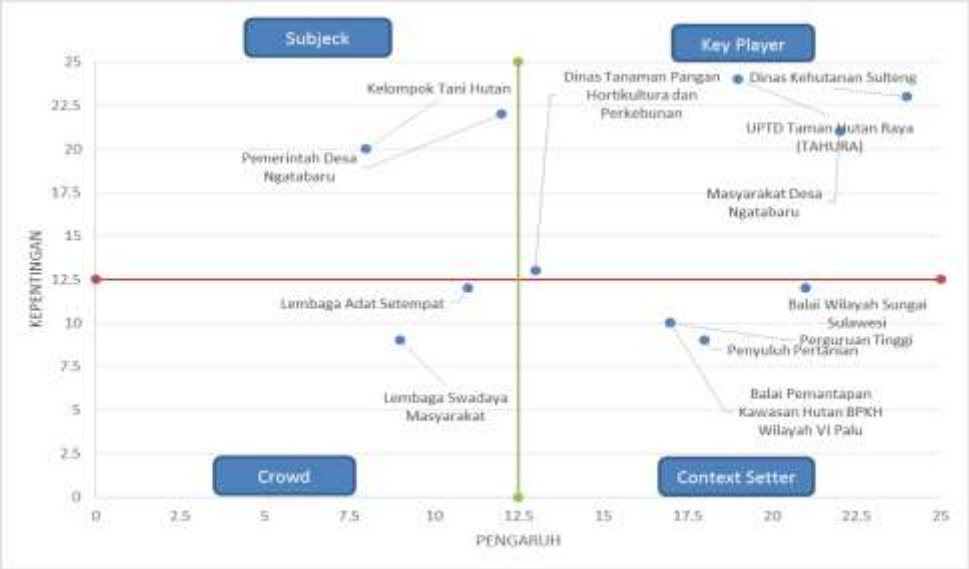

Gambar 3. Hasil Analisis Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder*

Secara umum, kondisi pada Gambar 3 di atas menunjukkan hasil yang selaras dengan kondisi faktual di lapangan. Secara detil dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Key player

Key player adalah kelompok *Stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi dalam Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura, sehingga dianggap paling berperan dalam penyelesaian konflik di Tahura. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *key player* adalah Dinas Kehutanan, UPTD. Tahura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Masyarakat Desa Ngatabaru. Hal ini sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawasi Tengah mempunyai peran yang

penting dalam pengelolaan Tahura Sulteng, peran Dishut Sulteng sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2015 adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Tahura, Kelompok *key player* dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura selanjutnya adalah UPTD Tahura. UPTD Tahura adalah aktor yang mempunyai kepentingan dan pengaruh paling tinggi dari seluruh stakeholder yang teridentifikasi, pengaruh dan kepentingan ini disebakan dalam PERDA No. 2 Tahun 2015 tersebut UPTD Tahura mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan perencanaan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan Tahura.

Key player selanjutnya yaitu Dinas Tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Stakeholder ini mempunyai peran dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Ngatabaru. Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan dan Penyuluh Pertanian Melalui program pembagian bibit tanaman pertanian dan pembagian ternak kambing dan pendampingan dengan harapan masyarakat tidak sepenuhnya menggantungkan hidup pada kawasan Tahura. Sehingga kelestarian ekosistem dapat terjaga dengan baik. *Key player* terakhir yaitu Masyarakat Desa Ngatabaru. *Stakeholder* ini mempunyai kepentingan dan ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan Tahura. Sehingga pemberian akses sangat dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan hutan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015 pemberian akses pemanfaatan adalah pemberian izin untuk melakukan pengumutan hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisonal dan izin penguasaan jasa wisata alam.

5.4.2 Subject

Subject adalah kelompok *Stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah. *Stakeholder* yang masuk dalam ketegori subjek mempunyai kekuatan kecil untuk mengubah situasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura, akan tetapi mereka dapat mempengaruhi *stakeholder* lain jika dapat berkerja sama maupun berkolaborasi dengan *Stakeholder* lainnya. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok subject adalah pemerintah Desa Ngatabaru dan Kelompok Tani Hutan. Pemerintah Desa Ngatabaru mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Tahura dengan peran pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Tahura. Disamping itu kelompok Tani Hutan yang hidup di sekitar kawasan Tahura menggantukan hidup di dalam kawasan Tahura. Selain itu berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015, masyarakat sekitar kawasan Tahura dan kelompok tani hutan diberi ruang untuk memanfaatkan kawasan Tahura, sehingga masyarakat merasa mempunyai dan perlu dilibatkan serta diberi akses penuh terhadap pengelolaan kawasan Tahura.

5.4.3 Context setter

Context Setter adalah kelompok *Stakeholder* yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. *Stakeholder* ini merupakan *Stakeholder*s yang harus selalu diperhatikan karena bisa jadi *stakhoders* yang berperan dalam mempengaruhi *Stakeholder* lainnya. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *context setter* adalah Perguruan Tinggi, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu, dan Penyuluh Pertanian.

Perguran Tinggi menjadi salah satu *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang tinggi dikarenakan perguruan tinggi dalam perannya dapat memperngaruhi *Stakeholder* lain dalam pemecahan konflik tenurial yang terjadi di kawasan konservasi.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III mempunyai peran dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih untuk masyarakat Desa Ngatabaru dan pasokan air untuk pengembangan wisata alam Kapopo. Jika mengacu pada PERDA No 2 Tahun 2015 maka peran kedua *stakeholder* ini sangat berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem dan pengembangan wisata Kapopo. Selanjutnya Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), *stakeholder* ini bertanggung jawab atas batas luar kawasan hutan, sejalan dengan hal tersebut, salah satu faktor penyebab konflik di Tahura adalah kurang jelasnya tata batas kawasan. Sehingga peran *stakeholder* ini sangat memiliki pengaruh yang tinggi dalam penyelesaian konflik tata batas kawasan Tahura Sulteng. Penyuluh pertanian, *stakeholder* ini memberikan penyuluhan juga mempunyai kepentingan yang tinggi dikarenakan salah satu hak dan kewajiban penyuluh dalam peraturan Dirjen PSKL melakukan pendampingan dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan maupun SDH dalam kawasan hutan.

5.4.4 Crowd

Crowd adalah kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dan kepentingan rendah dalam Pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura Sulteng, Namun demikian tetap menjadi pertimbangan untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan juga mempunyai peran

yang dibutuhkan dalam pengelolaan. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *crowd* adalah Lembaga swadaya masyarakat dan Lembaga Adat setempat. *stakeholder* yang mempunyai peran dalam pengelolaan Tahura. Peran dari kedua stakeholder ini yaitu memberikan informasi, dan juga pengawasan dengan melakukan pendampingan hak-hak masyarakat, Pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kepasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura Sulteng.

5.5 Tingkat Hubungan Antar Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder*

Mendalami hubungan antar *stakeholder* dibutuhkan untuk melihat tingkat hubungan keterkaitan antar *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang berperan dalam kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura Sulteng digambarkan dalam tabel hubungan aktor dengan menggunakan kata kunci yaitu peluang hubungan kerjasama, saling mengisi, dan potensi konflik (Nurtjahjawilasa, dkk. 2015). Kemudian dijelaskan dengan menggunakan analsis deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan gambaran tentang pola hubungan stakeholder dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9: Pola hubungan *Stakeholder*

	BPKH Wilayah VI Palu	Dishut	UPTD Tahura	Dinas TPHP	Penyuluh Pertanian	Pemdes Ngatabaru	Masy. Ngatabaru	Klmpk Tani Hutan	Lembaga Adat Setempat	Perguruan Tinggi	LSM
BalaiWSS III	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	2;3	1;2	1;2	1;2	1;2
BPH Wilayah VI Palu		1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2
Dishut			1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2;3	1;2	1;2	1;2
UPTD Tahura				1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2;3	1;2	1;2	1;2
Dinas TPHP					1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2
Penyuluh Pertanian						1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2
Pemdes Ngatabaru							1;2	1;2	1;2	1;2	1;2
Masy. Ngataaru								1;2	1;2	1;2	1;2
Kelompok Tani Hutan									1;2	1;2	1;2
Lembaga Adat Setempat										1;2	1;2
Perguruan Tinggi											1;2
LSM											

Keterangan: 1=hubungan kerjasama; 2=hubungan saling mengisi, dan 3=potensi Konflik

Sumber Data: Diolah 2019

Berdasarkan hasil analisis data, Hubungan antar *stakeholders* dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura *stakeholder* mempunyai peluang dalam menjalin kerja sama. Kerjasama antar stakeholder tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang sulit dipecahkan dalam pengelolaan kawasan Tahura.

Hubungan kerja sama dan saling mengisi dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan di Tahura dibutuhkan program bersama antara pihak

pengelola dan juga masyarakat sekitar kawasan, Kerjasama (cooperation) adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama (Bungin, 2008).

Proses terjadinya *cooperation* apabila diantara individu atau kelompok tertentu menyadari adanya kepentingan dan ancaman yang sama. Kerjasama antar stakeholders terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura sebagian besar merupakan hubungan kerjasama atas dasar tupoksi, aturan kelembagaan, serta kesamaan visi dan misi suatu lembaga, instansi dan kelompok masyarakat.

Bentuk hubungan saling mengisi adalah salah satu upaya memecahkan masalah yang memicu konflik berkepanjangan (Nurtjahjawilasa, N Dkk, 2015). Permasalahan utama dalam pengelolaan Tahura adalah tidak adanya keterbukaan antar masyarakat dan pemerintah. masyarakat merasa tidak mendapatkan kontribusi dari pihak pengelola Tahura. Namun peluang saling mengisi masih terbuka untuk stakeholder yang berkepentingan dalam penyusunan kebijakan dan program pengelolaan Tahura secara bersama.

Potensi konflik dalam pengelolaan Tahura terjadi antara pihak UPTD Tahura dengan Masyarakat Desa Ngatabaru, dan Kelompok Tani hutan. Potensi ini disebabkan oleh ketidak jelasan tapal batas dan juga akses masyarakat yang terbatas (Sylviani, 2014). Perbedaan persepsi batas kawasan di Tahura terjadi sejak lama. Bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui tata batas kawasan Tahura, walaupun pihak UPTD. Tahura telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Stakeholder yang mempunyai tujuan yang sama dalam kawasan Tahura memiliki peluang untuk berkolaborasi, akan tetapi secara aktual hubungan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Tahura Sulteng cenderung masih lemah terutama dalam pelibatan masyarakat lokal sehingga peranan dan kesadaran masyarakat lokal dalam upaya konservasi wilayah Tahura masih rendah.

5.6 Masalah-masalah dalam pelaksanaan strategi kolaborasi Tahura Sulteng

Pengelolaan kolaborasi adalah suatu metode untuk mengakomodasi berbagai kepentingan di sekitar kawasan konservasi (Winara, *et al*., 2011). Pengelolaan kolaborasi juga dikenal sebagai salah satu pendekatan yang bukan bersifat permusuhan (*non adversarial approach*) untuk penyelesaian konflik, sehingga dalam prakteknya kolaborasi banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pemangku kepentingan dalam konflik multipihak. Oleh karena itu pendekatan kolaborasi sering disebut juga sebagai jembatan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam (Suporahardjo, 2005). Kemudian dalam pelaksanaan kolaborasi tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diinginkan.

Menurut (Grey, 1989), Beberapa kondisi yang mungkin suatu kolaborasi tingkat keberhasilannya rendah yaitu:

- Konflik berakhir dengan berdasarkan perbedaan ideology;
- Suatu stakeholder mempunyai power untuk melakukan aksi sepihak (*unilateral action*);
- Isu-isu konstitusi dilibatkan atau keputusan hukum yang pernah terjadi secara legal diupayakan;
- Legitimasi pelaksana pertemuan tidak ditemukan;

- Adanya perbedaan power yang besar atau satu atau lebih kelompok stakeholder tidak dapat menetapkan perwakilannya;
- Isu-isu terlalu di masa lalu dan hingga sekarang berulang kali tidak efektif;
- Para pihak dari segi pengalaman di pandang atau dari segi informasi berlebihan dan butuh menarik diri dari konflik;
- Pemeliharaan hubungan antar organisasi disamakan dengan biaya yang besar bagi mitra.

Dari hasil analisis data dilapangan menunjukkan bahwa terdapat pokok masalah sehingga kolaborasi pengelolaan Tahura tidak berjalan antara lain:

Pertama, dalam hal ini antara pihak Dishut, UPTD. Tahura, Masyarakat Desa Ngatabaru dan Kelompok Tani belum menemukan kepentingan bersama. Kolaborasi dapat berjalan sukses bila berhasil membangun Common ground (pandangan yang sama). kemitraan akan sukses jika memberikan penekanan pada kepentingan bersama atau menemukan cara menjembatani kecocokan kepentingan yang masih berbeda (Suphorahadjo, 2005).

Kedua, kurangnya interaksi antara pihak pengelola Tahura dengan kelompok masyarakat Desa Ngatabaru. Pihak swasta masyarakat Desa Ngatabaru kurang diikutsertakan dalam seluruh kegiatan pengelolaan kawasan Tahura dalam hal Interaksi yang intensif dan berkualitas dalam proses pembuatan keputusan hingga terjadi sedikit permasalahan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar stakeholder.

Ketiga, masyarakat Desa Ngatabaru tidak mendapatkan kontribusi: kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat Desa Ngatabaru sekitar. Kurangnya penataan peran stakeholder yang memiliki kapasitas tinggi

sesuai dengan tugas pokok dalam pengelolaan Tahura Sulteng dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Tahura. Padahal proses kolaborasi memerlukan adanya sharing antara pelaksana dengan kolompok sasaran sehingga bisa mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, tingkat gangguan terhadap hutan dapat menurun. Dalam kemitraan yang kolaboratif adalah memotivasi keterlibatan para pihak agar tetap senang, agar tetap memiliki harapan, agar ada pengakuan dan penghargaan atas kontribusi para pihak masyarakat.

Keempat, kurangnya regulasi pendanaan: tidak banyak kasus kemitraan kolaboratif sukses karena pihak-pihak berusaha mendapatkan dan mengakui bantuan pihak lain.

5.7 Pola Kolaborasi Penyelesaian Konflik Tahura Sulteng

Pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan Tahura Sulteng diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Kehutanan P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang tata cara kerja sama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Hal-hal yang diatur dalam Permenhut tersebut meliputi prinsip kolaborasi, jenis-jenis kegiatan yang dikolaborasikan, kriteria para pihak yang terlibat dalam kolaborasi, bentuk dukungan para pihak dalam melakukan kolaborasi, materi kesepakatan kolaborasi, tahapan pelaksanaan kolaborasi, ketentuan pelaksanaan kolaborasi, dan sumber pendanaannya.

Untuk memahami pola kolaborasi stakeholder dalam penyelesaian konflik pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura perlu adanya respon dari pihak penentu

kebijakan sebagai upaya dalam melakukan visioning membangun hubungan visi bersama dengan menyatukan perbedaan sudut pandang demi tercapainya solusi.

Kegiatan kolaboratif selain untuk menjaga potensi kawasan Tahura dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat sekitar kawasan juga dimaksudkan untuk meredam kegiatan illegal yang dilakukan dalam kawasan Tahura. Dengan kolaboratif tidak hanya mendorong pelibatan *stakeholder*, tetapi juga berusaha menjamin transparasi proses, membangun kapasitas dan mendukung pengetahuan masyarakat sekitar akan fungsi Tahura. Ini merupakan aspek esensial dalam membangun proses pengelolaan Tahura yang lestari dan berkelanjutan.

Hasil kajian stakeholder yang terlibat memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap pengelolaan Tahura Sulteng yang menghasilkan *key player* yaitu UPTD Tahura, Dishut, Kelompok Tani, dan masyarakat Desa Ngatabaru. Namun stakeholder yang memliki peran kapasitas terhadap pengelolaan Tahura Sulteng dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Tahura belum berjalan sehingga masih adanya konflik. Setelah dievaluasi selama ini tidak ada singkronisasi maupun koordinasi dalam program pengelolaan Tahura Sulteng antara masyarakat sekitar kawasan Tahura Sulteng dengan pihak yang memiliki kapasitas terhadap pengelolaan Tahura Sulteng. Dengan ini perlu dibangun solusi kemitraan konservasi dalam hal akses pemanfaatan, masyarakat dapat memanfaatkan dengan tujuan tetap menjaga kelestarian Tahura Sulteng. Berdasarkan P.43/Menlhk/Setjen/kum.1/6/2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat agar tercapainya pengelolaan Tahura Sulteng yang lestari dan berkelanjutan.

Hasil penelitian konteks ideal pengelolaan Tahura secara kolaborasi teridentifikasi 12 *stakehoder* yang terlibat dalam pengeloaan Taman Hutan Raya (Tahura). Masing-masing *stakeholder* memiliki klasifikasi peran yang berbeda sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura. Peran *stakeholder* dalam berkolaborasi untuk pengelolaan Tahura belum terealisasi dengan baik dalam menentukan kebijakan, baik penentuan sasaran dan tujuan pengelolaan Tahura. Keterlibatan pihak pemerintah sangat membantu dalam pengembangan Tahura, seperti dalam hal meminimalisir konflik pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura.

Menurut Dewi, (2012) Keterlibatan multipihak dalam suatu kegiatan yang terkait dengan pengelolaan alam dan lingkungan telah dirasakan manfaatnya di berbagai daerah (Innes and Booher, 2002) terutama terkait dengan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis data hubungan antar *stakeholders* pihak UPTD. Tahura dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan antara lain masyarakat sekitar mempunyai kepentingan dan ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan Tahura sedangkan UPTD Tahura memiliki peran sebagaimana telah ditentukan dalam PERDA No 2 Tahun 2015 adalah mencegah dan mengatasi terjadi kerusakan kawasan Tahura Sulteng yang disebabkan manusia,

ternak, kebakaran, hama dan penyakit; mempertahanakan dan menjaga hak negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan Tahura Sulteng dan perangkat yang berhubungan dengan Tahura Sulteng. dengan Dekonstruksi itu dapat dilakukan dengan upaya:

1. Pemberdayaan masyarakat lokal; Pemberdayaan masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat, diakuinya peran dan kepentingan masyarakat dan diakomodasinya keinginan masyarakat dalam pengelolaan Tahura .
2. Pengintegrasian kegiatan konservasi; pengelolaan dan pemanfaatan Tahura oleh berbagai pihak (multistakeholders) yang berkepentingan:

- Membangun Integrasi komitmen bersama antara berbagai pihak.
- Peningkatan kolaborasi dan pembentukan jejaring kerja yang efektif antar berbagai pihak *stakeholder* tersebut, dorong pelestarian Tahura melalui upaya yang terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan.
- Dorongan konsolidasi dan pengembangan kapasitas ilmiah, teknologi dan hukum di tingkat lokal, nasional dan regional.

3. Pengaturan akses dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tahura secara adil

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian kolaborasi stakheholder dalam penyelesaian konflik di Tahura dibagi tiga kategori pencapaian tujuan penelitian yakni mengidentifikasi peran stakeholder terhadap pengeolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura Tahura Sulawesi Tengah, menganalisis masalah-masalah dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan di Tahura Sulawesi Tengah, dan merumuskan pola kolaborasi dalam peneyelesaian konflik di Tahura Tahura Sulawesi Tengah. Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura adalah Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Dinas Kehutanan Slteng, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Palu, UPTD Tahura, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan, Penyuluh Pertanian, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Ngatabaru, Kelompok Tani Hutan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Beberapa stakeholder tersebut mempunyai tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan Tahura. *Stakeholder* yang paling dominan memiliki peran Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDH di Tahura Sulawesi Tengah yaitu UPTD Tahura. Stakeholder yang mempunyai jumlah pengaruh dan kepentingan tertinggi yaitu UPTD. Tahura, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Stakeholder tersebut juga memiliki hak dan tanggung jawab pa ling besar, sementara masyarakat sekitar khususnya Desa Ngatabaru

penerima manfaat paling besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura Sulawesi Tengah. Peran *stakeholder* tersebut masih sangat rendah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sehingga masih ada pemanfaatan yang didapatkan oleh pihak Tahura Sulteng.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan di Tahura yaitu koordinasi antar pihak masih rendah, tata kelola dan dukungan kontribusi serta pembagian peran cenderung membuat pengelolaan Tahura tidak berjalan secara efektif.
3. Kolaborasi antar *stakeholder* dalam penyelesaian konflik di Tahura Sulteng dibutuhkan program solusi kemitraan konservasi dengan melibatkan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi di sekitar kawasan Tahura Sulteng. Menyamakan presepsi dan identifikasi kebutuhan setiap *stakeholder*, kejelasan penyusunan rencana pengelolaan Tahura yang lestari dan mensejahtrakan masyarakat sekitar kawasan hutan.

6.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran, diantaranya:

1. Diperlukan peran stakeholder yang saling mengisi dalam penyusunan kebijakan dan juga penyusunan program pengelolaan Tahura.
2. Permasalahan pemanfaatan kawasan Tahura Bersifat komplek, sehingga diperlukan usaha pembinaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kesadaran konservasi dan kegiatan peningkatan kesejahteraan

3. Penyelesaian konflik memerlukan penanganan yang bersifat holistik, multisektorial, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Abbas. 2005. *Mekanisme perencanaan partisipasi stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani*. [disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Agranoff, R, dan McGuire, M. 2003. *Collaborative Public Management*, Washington DC: GU Press.

Alviya Iis. Salminah Mimi. Arifanti Virni B. Maryani Retno dan Syahadat Epi. 2012. *Persepsi Para Pemangku Kepentingan Terhadap Pengelolaan Lanskap Hutan Di Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 9 (4): 171 – 184.

Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Cetakan ke-5. Penerbit Kanisius. Yogyakarta

Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Awang, S.A, Kasim. A, Tular. B, dan Salam. N. 2005. *Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional. Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.* Kendari. CARE International Indonesia Southeast Sulawesi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sigi. 2019. Kecamatan Sigi Biromaru dalam Angka. Sigi.

Balai Konservasi Sumberdaya Alam. 1997. Laporan hasil taksonomi Soil Survey. BKSDA VI Sulteng, Palu.

Bartos, O.J. dan Wehr. P. 2002. *Using Conflict Theory*. Cambridge University Press. New York.

Borrini Feyerabend, G. Farfar, N. T. Nguinguiri, J. C. Dan Ndangang, V. A. 2007. *Co-management of Natural Resource. Organizing, Negotiating and Learning.* Kasparek Verlag. Heidelberg (Germany). GTZ & IUCN.

Bungin, B. 2008. *Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jurnal Sosiologi Komunikasi Teori. Ed ke-1. Jakarta: Kencana.

Clement, F. M, Amezaga. J. 2009. *Afforestation and forestry land allocation in northern Vietnam: analysing the gap between policy intentions and outcomes.* Land Use Policy 26 (2): 458–470.

Dewi, I.N, HB. Ahmad.Rizal, dan Kusumedi. P. 2012. *Kajian Keterlibatan Multipihak Dalam Pelaksanaan Peraturan Perundangan Mengenai Hutan*

Lindung Di Kabupaten Pangkep. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 9 (1): 11-22.

Departemen Kehutanan. 2002. *Informasi Umum Kehutanan*. Departemen Kehutanan. Jakarta

Departemen Kehutanan. 1990. *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta

Fairuza, M. 2017. *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017.

Faisal, M.S. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Bogor: Pustaka Latin.

Golar, Toknok. B. Sustri. Rahman. A. dan Maiwa. A. 2014. *Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Agrowisata Kawasan Tahura Palu* [tidak dipublikasikan]. PT. Amara Tera. Palu.

Gray, B. 1989. *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems*. San Francisco. CA: Jossey-Bass

Grimble, R. and K. Wellard. 1997. *Stakeholder methodologies in natural resource management: A review of concepts, contexts, experiences and opportunities. Agric. Systems* 55:173–193.

Handayani, F, dan Warsono, H. 2017. *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Karangjahe Di Kabupaten Rembang*. *Journal of Public Policy And Management Review*. 6 (3): 1- 13.

Hakim L, Aldianoveri. I. Bangsa I.K. dan Guntoro A.D. 2018. *Peran Dan Dampak Konflik Tenurial Kehutanan Bagi Pengelolaan Keanekeragaman Hayati Di Kawasan Cagar Biosfer Di Jawa Timur*. Jurnal Hutan Tropis. 6 (1): 43-51.

Hardiyanto, G. 2013. *Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan Sesaot Provinsi Nusa Tenggara Barat*. [Tesis]. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hidayah, N. 2008. *Selayang Pandang Sulawesi Tengah*. Jakarta: Penerbit PT. Intan Pariwara

Ilham, M. 2006**.** *Analisa Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Sekitar Hutan*. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Innes and Booher, J.E., D.E. 2000. *Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy*. Institute of Urban and Regional Development University of California, Berkeley.

Iskandar. 2015. *Analisis peran stakeholders di cagar alam Gunung Tinombala* : An Atributional framework for Organizing descriptive and normative theory. Academy of Management Review

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 24/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan TAHURA SULTENG

Kilman, R.H. and Thomas, K.W. 1978. *Four Perspektives on Conflic Management* : An Atributional framework for Organizing descriptive and normative theory. Academy of Management Review

Kobbail A A Rahim. 2010. *Collaborative Management for Sustainable Development of Natural Forests in Sudan: Case Study of Elrawashda and Elain Natural Forests Reserves*. International Journal of Social Forestry (IJSF). 3(2): 101-133.

Kusumanto T, El Yuliani, Macoun P, Indriatmoko Y, Adnan H. 2005. *Belajar Beradaptasi: Bersama-sama Mengelola Hutan di Indonesi*a. Bogor, CIFOR

Kurnijanto, P. 2013. *Strategi Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Palu sebagai Kawasan Wisata Alam di Kota Palu*. Palu: e-Jurnal Katalogis, I (2), diakses 15 Juni 2018

Lahandu, J, Rudy. C, Tarumingkeng, dan Hariadi. K. 2016. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam Oleh Masyarakat Kaili Di Taman Hutan Raya (Tahura) Sulteng*. J.Agrisains 17 (1): 24-33.

Linarwati, M, Fathoni. A, Minarsih. M.M. 2016. *Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus*. Journal Of Managemen, 2 (2): 1-8.

Listyo, W.M, Soekmadi. R, Susilo. A.H. 2018. *Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 8 (1) 55-61.

Maiwa, A. 2015. *Manajemen Kolaboraasi Sebagai Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu*. Universitas Tadulako. Palu

Maiwa, A, Syukur. U, Golar, Rahman. A. 2018. *Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu*. Jurnal Warta Rimba. 6 (2). http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/11097/8599

Mangandar. 2000. *Keterkaitan masyarakat di sekitar hutan dengan kebakaran hutan*. [tesis]. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

MacKinnon, J. Dkk. 1993. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Terjemahan; Amir Harsono, H. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Mayasari, T. 2015. *Perubahan Kelembagaan Formal dalam Pengelolaan Agroforestry di Tahura Wan Abdul Rahman*. Thesis. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Maleong, L 1997. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung.

Muis, H, Irianingsih. I, dan Sustri. 2013. *Desain Model Kolaborasi Sebagai Resolusi Konflik Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) (Kasus Di Desa Watumeata Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso). Laporan Hasil Penelitian*, Universitas Tadulako. Palu

Mushove, P. and C. Vogel. 2005. *Heads or tails? Stakeholder analysis as a tool for*
conservation area management. Global Environ. Change 15:184–198.

Neil Abraham, Golar, dan Hamzari. 2016. *Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Desa Sidondo I Kecamatan Biromaru dan Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa)*. e-Jurnal Mitra Sains, 4 (1): 29-39.

Nurlia, A, Martin. E, dan Winarno. B. 2018. *Kajian Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Hutan Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Provinsi Lampung.* Prosiding Aspek Sosial Ekonomi & Kebijakan

Nurfatriani, F. Darusman. D. Nurrochmat. D.R. dan Yustika A.E. 2015. *Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12 (2): 105-124

Nurtjahjawilasa, K, H. Ridho N.D, dan Justianto. A. 2015. *Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12 (3): 235 – 248.

Oktavia, S, dan Saharuddin. 2013. *Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor*. Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 01, No. 03. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB. Bogor

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MenLHK/Setjen/kum.1/6/2017 *Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian*. Departemen Kehutanan. Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta

Pruit, D.G dan Rubin, J.Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Prabowo, E.D, Arief. H, Sunrminto. T. 2015. *Peran Stakeholder Pada Aspek Konservasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Tnkps).* Jurnal Media Konservasi. 20 (1): 27-33.

Prabowo, SA, Basuni. S, Suharjito. D. 2010**.** *Konflik Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak.* JMHT Vol. 3: 137–142

Prasetyo, S.B. 2010. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap keputusan masyarakat daerah penyangga taman nasional lore lindu dalam menerapkan pola agroforest (studi kasus desa sigimpu dan desa sintuwu kecamatan palolo).* Tesis. Universitas Tadulako. Palu.

Purwanti, F. 2008. *Konsep Co-Management Taman Nasional Karimunjawa*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor

Ramadhan, Teddy. AF, Susdiyanti. T, Salampessy. M.L. 2015. *Identifikasi Akses Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Studi Kasus Di Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor)*. Jurnal Nusa Sylva. 15 (2): 27-36.

Race, D. and J. Millar. 2006. *Training Manual: Social and community dimensions of ACIAR* Projects. Australia : Australian Center for International Agricultural

Reed, M.S, A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C.H. Quinn, L.C. Stringer. 2009. *Who's In And Why? A Typology Of Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management.* Journal of Environmental Management 90 (2009) 1933–1949. Elsevier.

Saleh, S. 2013. *Kearifan Lokal Masyarakat Kaili Di Sulawesi Tengah*. Jurnal Academica Fisip Untad, 05 (02): 1411- 3341

Saputra, F. 2018. *Peran Stakeholders Dalam Implementasi Fungsi Konservasi Di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda*. Skripsi. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor

Semu, D.Y, Arsyad. U, dan Umar. A. 2018. *Indikator Kinerja dan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lisu*". Jurnal Hutan dan Masyarakat. 10 (2): 257-267

Singarimbun, M dan S. Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka Lembaga Penelitian. Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

Sylviani, S, dan Hakim. I. (2014). *Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 11(4): 309-322.

Soekmadi, R. 2003. *Pergeseran Paradigma Pengelolaan Kawasan Konservasi Sebuah Wacana Baru Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. Media Konservasi* Vol. VIII (3). 2003. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Sulastriono. 2014. *Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat*. Jurnal media hokum. 21 (2): 214-224.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Susan, N. 2009. *Sosiologi konflik Isu-Isu Konflik Kontemporer.* Jakarta: Kencana

Suporahardjo. 2005. *Manajemen Kolaborasi*. Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Bogor. Pustaka LATIN

Tadjudin, D. 2009. *Manajemen Kolaborasi.* Pustaka Latin: Bogor

Taruk, L.S. 2014. *Kajian Pengelolaan Taman Wisata Alam Wera Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Sains Dan Teknologi Tadulako, 3 (1): 23-33.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.* Lembaran RI Tahun 1990 No. 5. Jakarta : Dephut.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang Kehutanan. Lembaran RI Tahun 2011 No. 28. Jakarta : Sekretariat Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Lembaran RI Tahun 2011 No. 28. Jakarta : Sekretariat Negara.

Winara, A, dan Mukhtar. A.S. 2011. *Potensi Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua*. Penelitian hutan dan konservasi alam. 8 (3): 217-226.

Wakka, A.K. 2014. *Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 3 (1): 47 – 55.

Wulandari dan Sumarti. 2011. *Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. 06 (1): 32-50.

Wollenberg, E, J. Anderson and C. Lopez. 2005. *Though All Things Differ: Pluralism as A Basis for Cooperation in Forest*. Bogor. CIFOR

Whitney. 1960. *Penelitian Deskriptif Menurut Whitney (online)*. Tersedia *http://uki-sukrianto.blogspot.com/2012/05/penelitian-deskriptif-menurutwhitney.html,* diakses pada 20 maret 2019

Wakka, A.K. Muin dan Purwanti. 2015. *Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan*. *jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea.* 4 (1): 41 – 50.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Peta Tutupan Lahan Lokasi Penelitian Tahura Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

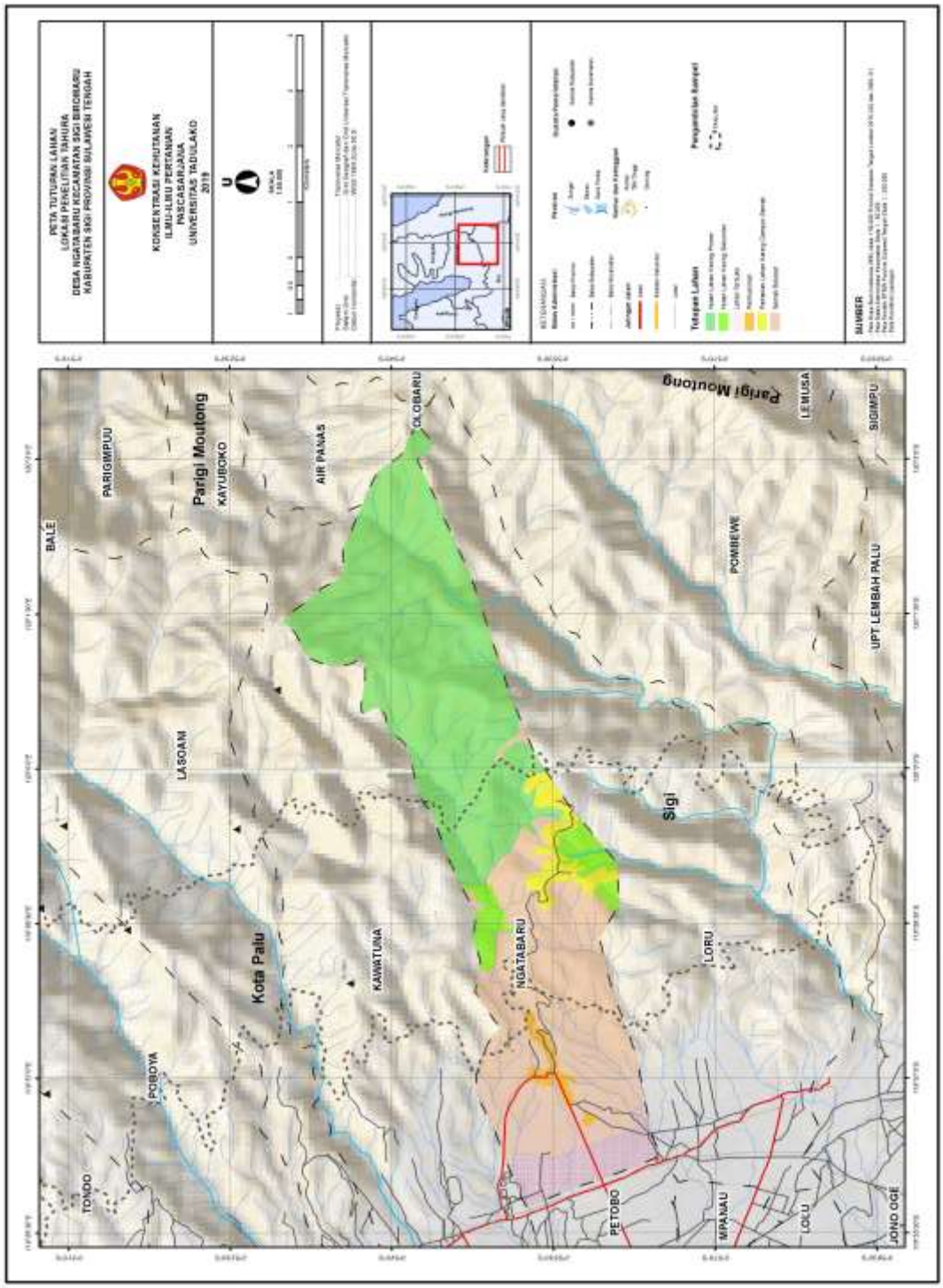

Lampiran 2: Peta Pemanfaatan Blok Tahura Provinsi Sulawsesi Tengah

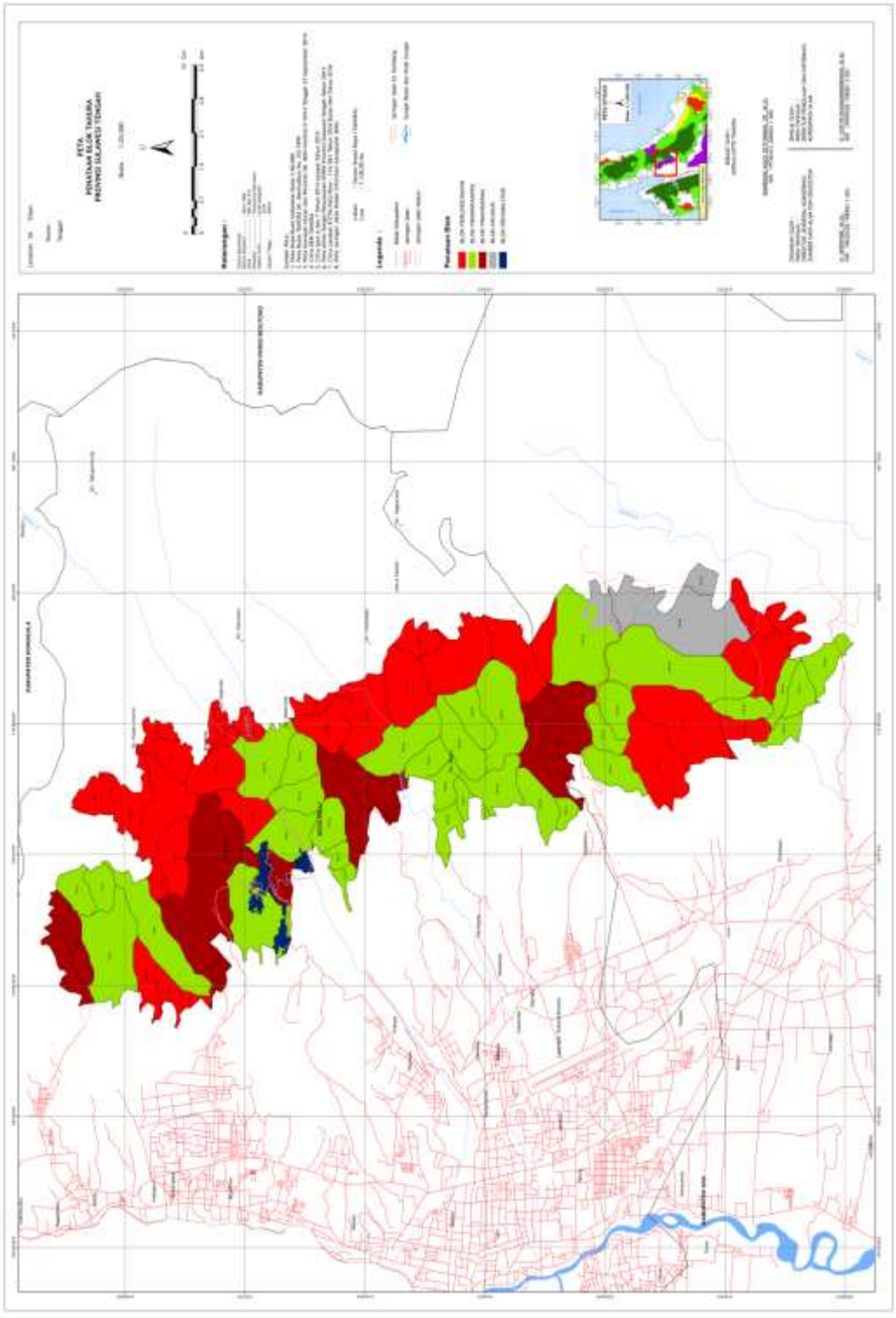

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Tanggungan :

B. Peran *Stakeholder* Terhadap Pengelolaann dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Tahura Sulteng

Kriteria penilaian tingkat pengaruh *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Tahura Sulteng.

Unsur	Sub Unsur	Jumlah Nilai Skor				
		Ada ≤ 4	**Ada 3**	**Ada 2**	**Ada 1**	**Tdk ada**
Bagaimanakah kondisi kekuatan *stakeholder* terhadap pengelolaan pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura ? Kondisi kekuatan *stakeholder* meliputi opini/pendapat, kebudayaan, pendidikan, promosi, aturan/pengawasan.	a. **Pendapat** (Mengenai pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura) b. **Kebudayaan** (Sesuai kebudayaan /kultur masyarakat di Desa Ngatabaru) c. **Pendidikan** (mengenai tingkatan pendidikan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura)					

	d. **Aturan/pengawasan** (aturan berskala nasioanal atau local) e. **Promosi** (mengenai kualitas Tahura Sulteng)					
Bagaimanakah kondisi kelayakan stakeholder terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura ? Kondisi kelayakan stakeholder meliputi sanksi administrasi, sanksi finanial, sanksi hukum dan sanksi moral	a. **Sanksi administrasi** (teguran tertulis, Pembekuan izin dan pencabutan izin) b. **Sanksi finansial** (sangsi tidak memberikan anggaran/pendanaan) c. **Sanksi hukum** (Penjara) d. **Sanksi moral** (Tidak ada lagi kepercayaan dari Tahura Sulteng)					
Bagaimanakah kondisi kompensasi stakeholder terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? Kondisi kompensasi stakeholder meliputi pemberian gaji/upah, pemberian sebidang lahan, pemberian bantuan/kegiatan, pemberian award dan lainnya.	a. **Pemberian gaji/upah** (masyarakat Desa Ngatabaru/anggota) b. **Pemberian sebidang lahan** (masyarakat Desa Ngatabaru /anggota) c. **Pemberian bantuan/ kegiatan** (masyarakat Desa Ngatabaru /anggota)					

	d. **Pemberian award** (masyarakat Desa Ngatabaru /anggota) e. Lainnya					
Bagaimanakah kondisi kepribadian *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? Kondisi kepribadian stakeholder meliputi karisma seseorang, kekuatan fisik, kecerdasan mental, kekayaan dan lainnya.	a. **karisma** b. **seseorang** (Berwibawa dan dapat memikat masyarakat) c. **kekuatan fisik** (sehat jasmani) **d. kecerdasan mental** yang dimiliki stakeholder e. **kekayaan** yang dimiliki stakeholder **f. Jiwa bersosial** yang dimiliki stakeholder					
Bagaimanakah kondisi kekuatan organisasi/kelembagaan stakeholder terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? Kondisi kekuatan organisasi stakeholder meliputi kekuatan anggaran (≥30 %), kekuatan SDM (terdapat jenjang sarjana), keesuaian bidang fungsi, kemampuan menjalin kerjasama/jejaring kerja dan pemberian perijinan	**a. kekuatan anggaran (≥30%).** (Terhadap pengelolaan Kawasan Tahura) b. **kekuatan SDM** (Sesuai standar atau tidak) c. **Kekuatan bidang fungsi** (bekerja sesuai tupoksi) d. **Kemampuan menjalin kerja sama/jejaring kerja** (sesama pihakTahura dan masyarakat) e. **Pemberian perijinan** (kepada stakeholder					

	lain/anggota)					

Keterangan : 5 = Sangat tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Cukup Tinggi, 2 = Kurang Tinggi dan 1 = Rendah

Kriteria penilaian tingkat kepentingan *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan di Kawasan Tahura Sulteng.

Unsur	**Sub Unsur**	**Jumlah Nilai Skor**				
		Ada ≤ 4	**Ada 3**	**Ada 2**	**Ada 1**	**Tdk ada**
Bagaimanakah bentuk keterlibatan stakeholder terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? Bentuk keterlibatan stakeholder meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi	**a. Perencanaan program kolaborasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan Tahura** (Keterlibatan seluruh stakeholder dalam perencanaan yang dilakukan secara bersama bertujuan untuk mewujudkan dan memaksimalkan pengelolaan Tahura untuk meminimalisir konflik) a. **Pengorganisasian program kolaborasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan Tahura** (pembagian tugas dan sumberdaya serta anggaran program kerja bersama dalam masing-masing stakeholder) b. **Pelaksanaan program kolaborasi terhadap**					

	pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan Tahura (melibatkan masyarakat di dalam maupun di sekitar obyek pengelolaan Tahura). c. **Pengawasan program kolaborasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan Tahura** (melalui pencapaian pelaksanaan program berdasarkan tujuan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Pengeloaan dan pemanfaatan tersebut) d. **Evaluasi** (Penilaian program kolaborasi pengelolaan kawasan Tahura dilakukan dalam bentuk laporan evaluasi yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan program kerja bersama dan langkah yang akan diambil selanjutnya)					
Manfaat apa sajakah yang diperoleh stakeholder terhadap	a. **Sumber penerimaan** (yang bersifat menguntungkan: ekonomi dan moral) b. **Menciptakan**					

pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura ? Bentuk manfaat yang diperoleh stakeholder adalah sebagai sumber penerimaan, menciptakan lapangan kerja, membuka akses, promosi daerah dan mendorong pembangunan daerah.	**lapangan kerja** (Untuk masyarakat setempat) c. **Membuat akses** (Membuat akses serta prasarana di kawasan pengelolaan Tahura) d. **Mendorong pembangunan daerah** (Dengan meningkatkan kualitas pemberdayaan SDM dan kualitas pengelolaan SDA) e. **Promosi daerah dan mendorong pembangunan daerah** (dapat dilakukan dengan mendistribusikan hasil dari dalam pengelolaan kawasan Tahura)					
Bagaimanakah upaya program kolaborasi stakeholders terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura? Bentuk-bentuk upaya stakeholder meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura, pembangunan sarana prasarana, memberikan layanan perijinan, pengelolaan dan pemanfaatan	a. **Perlindungan dan pengamanan Kawasan Tahura** (Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar ketentuan pengelolaan kawasan Tahura Sulteng). b. **Pembangunan sarana dan prasarana** c. **Memberikan pelayanan perizinan** (masyarakat dan, dari pihak lembaga lain). d. **Penyedian data dan informasi**					

SDH oleh masyarakat setempat serta penyediaan data dan informasi.	(Terkait dengan program kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Tahura) e. **Program kolaborasi terhadap Pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura Sulteng** (Apakah menyeluru atau kelompok saja)					
Apa sajakah program kerja stakeholder terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura?	a. **>20% dalam tupoksi** b. **16-20% dalam tupoksi** c. **11-15% dalam tupoksi** d. **6-10% dalam tupoksi** e. **<5% dalam tupoksi**	>20%	16-20%	11-15%	6-10%	<5%
Bagaimana tingkat ketergantungan stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDH di kawasan Tahura?	a. **81-100 %** pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura sebagai sumber pendapatan stakeholder b. **61-80 %** pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura sebagai sumber pendapatan stakeholder c. **41-60 %** pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura sebagai sumber pendapatan stakeholder d. **21-40 %**	81-100%	61-80%	41-60%	21-40%	<21%

	pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura sebagai sumber pendapatan stakeholder e. **<21%** pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Tahura sebagai sumber pendapatan stakeholder					

Keterangan : 5 = Sangat tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Cukup Tinggi, 2 = Kurang Tinggi dan 1 = Rendah

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian

Keterangan: Dokumentasi saat pengambilan data pada Responden

Keterangan: Dokumentasi saat pengambilan data pada Responden

Keterangan: Dokumentasi saat pengambilan data pada Responden

Keterangan: Dokumentasi saat pengambilan data pada Responden

Keterangan: Dokumentasi saat pengambilan data pada Responden

Keterangan: Dokumentasi saat pengambilan data pada Responden

Keterangan; : Dokumentasi saat pengambilan data pada pengelola Tahura

Keterangan: Foto papan Informasi kawasan wisata TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Lengkap Maria Sofiana lahir di Kabinuang pada tanggal 04 Maret 1993. Terlahir sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Sapril, S.Pd dan dan Aspiyah.

Penulis mengikuti jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar SDNegeri 1 Dampal Utara pada tahun 1999 dan lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Dampal Utara pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Model Banawa Kabupaten Donggala dan tamat pada tahun 2011, dan pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan Sarjana ke Perguruan Tinggi Universitas Tadulako dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Magister di Program Studi Ilmu-ilmu Pertanian Pascasarjana, Universitas Tadulako.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master pada Pascasarjana Universitas Tadulako, penulis telah menyelesaikan penelitian dengan judul **"Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penyelesaian Konflik Di Tahura Sulawesi Tengah"** dibawah bimbingan **Dr. Golar, S.Hut., M.Si** dan **Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc**